

SKRIPSI

**PERSEPSI PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)
TERHADAP LAPORAN KEUANGAN BERBASIS SAK-EMKM DI
PAREPARE
(ANALISIS AKUNTANSI SYARIAH)**



OLEH

**SULVI SHAFIRA AMALIA
NIM : 17.2800.048**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

**PERSEPSI PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)
TERHADAP LAPORAN KEUANGAN BERBASIS SAK-EMKM DI
PAREPARE
(ANALISIS AKUNTANSI SYARIAH)**



OLEH

**SULVI SHAFIRA AMALIA
NIM : 17.2800.048**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi (S.Tr.Ak) pada Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

PENGESAHAN PEMBIMBING

Judul : Persepsi Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Terhadap Laporan Keuangan Berbasis SAK-EMKM di Parepare (Analisis Akuntansi Syariah)

Nama Mahasiswa : Sulvi Shafira Amalia

NomorInduk Mahasiswa : 17.2800.048

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B.746/In.39.8/PP.00.09/2/2021

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
NIP : 19730129 200501 1 004

Pembimbing Pendamping : Dr. Damirah, S.E., M.M
NIP : 19760604 200604 2 001

Mengetahui:



Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
19710208 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul : Persepsi Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Terhadap Laporan Keuangan Berbasis SAK-EMKM di Parepare (Analisis Akuntansi Syariah)

Nama Mahasiswa : Sulvi Shafira Amalia

NomorInduk Mahasiswa : 17.2800.048

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B.746/In.39.8/PP.00.09/2/2021

Tanggal Kelulusan : 19 Agustus 2022

Disahkan Oleh Komisi Penguji

- Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. (Ketua)
 - Dr. Damirah, S.E., M.M. (Sekertaris)
 - Dr. Syahriyah Semaun, S.E., M.M. (Anggota)
 - Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. (Anggota)
- 

PAREPARE

Mengetahui:
Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 200112 2 002



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَ
 عَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Rasa syukur yang tiada henti-hentinya penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda tercinta Sultan dan Ibunda tercinta Hakimah, serta seluruh keluarga tercinta yang senantiasa memberi semangat, nasihat, dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak akan terlaksana apabila tidak ada bantuan, kerjasama, serta dukungan pihak-pihak yang berbaik hati mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran secara sukarela membantu serta mendukung penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis dengan kerendahan hati mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag, selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana yang positif bagi mahasiswa.

3. Ibu Dr. Hj. Muliati, M.A selaku Dosen Penasehat Akademik yang selalu membimbing dan mengarahkan penulis untuk urusan akademik.
4. Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag., selaku Wakil Rektor III bidang kemahasiswaan dan kerjasama sekaligus dosen pembimbing utama dan Ibu Dr. Damirah, S.E., M.M.. selaku pembimbing pendamping yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, pengarahan, dan masukan yang sangat berharga kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Dr. Ahmad Dzul Ilmi, M.E., sebagai penanggungjawab Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah yang telah meluangkan waktunya untuk mengembangkan program studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu dan wawasannya kepada penulis selama studi di IAIN Parepare.
7. Segenap staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas segala arahan dan bantuannya.
8. Seluruh responden penelitian yang telah meluangkan waktu untuk diwawancara.
9. Orang-orang terdekat yang telah memberi dukungan serta semangat dalam menyelesaikan studi.
10. Keluarga besar Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah, khususnya angkatan 2017 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu menjadi teman belajar dan diskusi selama penulis menuntut ilmu di IAIN Parepare.
11. Semua teman-teman seperjuangan angkatan 2017 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberi warna tersendiri pada alur kehidupan penulis selama studi di IAIN Parepare.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 18 Juli 2022 M

18 Dzulqaadah Hijriya

Penulis



SULVI SHAFIRA AMALIA

NIM. 17.2800.048



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Sulvi Shafira Amalia
NIM : 17.2800.048
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 20 Februari 1999
Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan SYariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : `Persepsi Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)
Terhadap Laporan Keuangan Berbasis SAK-EMKM di
Parepare (Analisis Akuntansi Syariah)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 18 Juli 2022 M

Penyusun



SULVI SHAFIRA AMALIA
NIM. 17.2800.048

ABSTRAK

Sulvi Shafira Amalia. *Persepsi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap laporan keuangan berbasis SAK-EMKM di Parepare (Akuntansi Syariah)* (dibimbing oleh Muhammad Kamal Zubair dan Damirah)

SAK-EMKM merupakan laporan keuangan yang diatur sesuai dengan standar penyusunan dan batasan-batasan dalam menyusun laporan keuangan untuk pelaku UMKM. Hal ini merupakan tanggungjawab yang harus dipahami serta diimplementasikan oleh pelaku UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi pelaku UMKM terhadap laporan berbasis SAK-EMKM, mengetahui hambatan pelaku UMKM dalam melakukan penyajian laporan keuangan berbasis SAK-EMKM serta kesesuaian SAK-EMKM dengan pencatatan akuntansi Syariah

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini mencakup UMKM yang berada di Kota Parepare dengan waktu penelitian kurang lebih 30 hari. Sumber data yang diperoleh dari hasil obesrvasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan persepsi oleh pelaku UMKM di Kota Parepare dalam penyajian laporan keuangan berbasis SAK-EMKM, sebagian besar pelaku usaha menilai bahwa laporan keuangan sulit, rumit, menyita banyak waktu serta menambah biaya operasional jika menggunakan jasa dalam melakukan penyusunan laporan keuangan. Namun, terdapat juga beberapa pelaku usaha yang menggunakan jasa tersebut sehingga tidak menemukan masalah. Kendala utama dalam penyajian laporan keuangan berbasis SAK-EMKM adalah masih kurangnya pengetahuan serta pemahaman pelaku usaha terkait penyajian laporan keuangan sehingga diperlukan tindakan khusus oleh pemerintah terkait hal ini. Selanjutnya, laporan keuangan berbasis SAK-EMKM telah memiliki kesesuaian dengan akuntansi Syariah ditinjau dari konsep pencatatan serta prinsip.

Kata Kunci: Persepsi, UMKM, SAK-EMKM,

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan	8
B. Tinjauan Teori.....	14
1. Standar Akuntansi Keuangan	14
2. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM).....	16

3. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	21
4. Akuntansi Syariah	26
5. Persepsi.....	30
C. Kerangka Konseptual	30
D. Kerangka Pikir	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	34
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	35
C. Fokus Penelitian	35
D. Jenis dan Sumber Data	35
1. Data Primer	35
2. Data Sekunder	35
F. Teknik Pengumpulan Data	36
G. Teknik Uji Keabsahan Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Hasil Penelitian	43
B. Pembahasan Penelitian.....	53
BAB V PENUTUP.....	69
A. Simpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN	V
BIODATA PENULIS	XXXII

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 1.1	Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Parepare	2
Tabel 1.2	Kriteria UMKM	23
Tabel 1.3	Data UMKM yang di wawancarai	43



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	33
2.2	Wawancara dengan pendamping UMKM Dinas Tenaga Kerja	XXX
2.3	Wawancara dengan pemilik bengkel racing motor	XXX
2.4	Wawancara dengan pemilik SumBox	XXXI
2.5	Wawancara dengan pemilik US. Putra Jaya	XXXI



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp.	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Keterangan	VI
2	Pedoman Wawancara	XI
3	Hasil Wawancara	XIV
4	Deskripsi Lokasi Penelitian	XXV
5	Dokumentasi	XXIX



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	er
ز	zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	Ya	y	ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I

أ	Dammah	U	U
---	--------	---	---

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	fathah dan ya	ai	a dan i
وُ	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ / اَ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يِ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- Ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا	: rabbanā
نَجَّيْنَا	: najjainā
الْحَقُّ	: al-ḥaqq
الْحَجُّ	: al-ḥajj
نُعَمَّ	: nu‘‘ima
عُدُوْ	: ‘aduwwun

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i). Contoh:

عَرَبِيٌّ	: ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
عَلِيٌّ	: ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

السَّمْسُ	: al-syamsu (bukan asy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ	: al-zalزالah (bukan az-zalزالah)
الفَلْسَفَةُ	: al-falsafah
الْبِلَادُ	: al-bilādu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta‘murūna
النَّوْءُ	: al-nau‘
سَيِّئٌ	: syai‘un
أَمْرٌ	: umirtu

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur‘an* (dar *Qur‘an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

<i>Fī zilāl al-qur‘an</i>
<i>Al-sunnah qabl al-tadwin</i>
<i>Al-ibārat bi ‘umum al-lafz lā bi khusus al-sabab</i>

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*
بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan
Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an
Nasir al-Dīn al-Tusī
Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

PAREPARE

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bagian terpenting dalam perekonomian di Indonesia. UMKM berperan dalam mempercepat laju pertumbuhan ekonomi melalui misi penyediaan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat serta berperan dalam perolehan devisa negara. UMKM di Indonesia tersebar dalam berbagai sektor komoditi usaha. UMKM dinyatakan sebagai sektor yang paling tahan banting dalam menghadapi perubahan yang terjadi contohnya pada saat krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1998.¹

UMKM merupakan salah satu bentuk usaha kecil masyarakat yang pendiriannya berdasarkan inisiatif seseorang.² Biasanya UMKM bergerak didalam sektor industri lokal dengan hasil produk yang beragam sehingga UMKM mampu bersaing di pasar ekspor dan tidak lagi bergantung pada produk impor. Karenanya UMKM dinilai mampu memaksimalkan potensi sumber daya yang ada. Apabila UMKM mampu menjadi pelaku utama dalam mendorong perekonomian di Indonesia menjadi produktif dan memiliki daya saing, maka perekonomian Indonesia dapat menunjukkan dalam memiliki fundamental yang kuat.

¹ Lilis Sulastri. *Manajemen Usaha Kecil Menengah*.v(Bandung: LaGood's Publishing, 2016), h.12

² Sri Handini, Sukesi, at all. *Manajemen UMKM dan Koperasi*. (Surabaya: Unitomo Press, 2019), h.19

Tabel 1.1 Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Parepare.

No	Sektor Usaha	Kecamatan				Jumlah UMKM
		Soreang	Ujung	Bacukiki	Bacukiki Barat	
1	Mikro	4.223	2.197	873	5.026	12.319
2	Kecil	1.480	254	58	190	1.982
3	Menengah	65	30	-	19	144
Total		5.768	2.481	931	5.235	14.415

Sumber : Data Jumlah UMKM Dinas Ketenaga Kerjaan Parepare

Jumlah UMKM di Kota Parepare ada 14.415 UMKM pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan UMKM di Kota Parepare juga meningkat dari tahun ke tahunnya. Hal ini juga memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat, sebab UMKM mampu menyerap tenaga kerja dan membuka lapangan pekerjaan.

Perkembangan ekonomi yang semakin pesat memiliki dampak bagi perkembangan UMKM. Dalam menjalankan usahanya UMKM harus diimbangi dengan kemampuan bersaing dengan usaha lainnya. Kompetisi yang semakin ketat memberikan posisi tertentu bagi UMKM, industri kecil yang tidak mampu bersaing dalam pesatnya perkembangan ekonomi akan tergusur dari pesaing usaha lainnya.

Permasalahan yang sering dihadapi oleh pelaku usaha UMKM dalam menjalankan aktivitas usaha membuatnya sulit berkembang. Ada beberapa permasalahan yang sering dihadapi oleh UMKM di Indonesia. Pertama, kurangnya permodalan dan terbatasnya akses pembiayaan. Kedua, kualitas sumber daya

manusia (SDM). Ketiga, kurangnya transparansi.³ Keempat, belum memiliki sistem administrasi keuangan dan manajemen yang baik.

Pengusaha kecil pada umumnya kurang memperhatikan strategi bisnis bahkan tidak memiliki rencana pengembangan usaha. Mereka berfokus bagaimana menjual barang tanpa memikirkan bagaimana melakukan perbaikan kepada produk yang mereka pasarkan supaya lebih baik. Kebanyakan pengusaha UMKM berfokus hanya pada penjualan dan hasil usaha yang mereka dapatkan biasanya akan dihabiskan untuk konsumsi pribadi dan keluarga. Dapat dibayangkan, jika pelaku UMKM menghabiskan seluruh keuntungannya hanya untuk konsumsi pribadi tentu tidak akan ada perkembangan usaha. Usaha yang dijalankan hanya akan jalan ditempat, tidak mandiri dan hanya menunggu bantuan suntikan dana.⁴

Pencatatan laporan keuangan merupakan hal yang penting dan berguna untuk dilakukan bagi pelaku usaha UMKM. Laporan keuangan merupakan hal utama ataupun hasil akhir dari proses pencatatan akuntansi yang memberikan informasi serta sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. Selain dari pada itu, laporan keuangan bisa dipergunakan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan dilihat dari entitas yang bisa digunakan untuk menampilkan keberhasilan suatu entitas dalam mencapai tujuannya.⁵ Maka dari itu, kedudukan laporan keuangan bagi UMKM memiliki peranan yang penting dikarenakan laporan keuangan membagikan data keuangan dari suatu badan usaha, menampilkan keadaan keuangan perusahaan pada tanggal tertentu dan periode tertentu.

³ Lilis Sulastri, *Manajemen Usaha Kecil Menengah*, (Bandung: LaGood's Publishing, 2016), h.13

⁴ Putu Krisna Adwitya, Putu Nurwata. *Tata Kelola Manajemen dan Keuangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah*. (Gowa: CV.Cahaya Bintang Cemerlang, 2021), h.3-4

⁵ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 7

Pencatatan laporan keuangan juga berperan dalam perhitungan pajak bagi UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak terkait mengenai kewajiban pajak UMKM PP Nomor 23 tahun 2018 yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.⁶

Masih banyak pelaku UMKM yang belum melakukan pencatatan laporan keuangan. Para pelaku usaha hanya melakukan pencatatan kecil berupa pengeluaran dan pemasukan. Seperti halnya di Rumah makan Pariaman Laweh, Kota Parepare yang hanya melakukan pencatatan sederhana saja. Hanya sebagian kecil pelaku usaha yang memprioritaskan faktor keuangan, hal ini disebabkan oleh minimnya sosialisasi dan ketidaksadaran pengusaha UMKM dalam mempertimbangkan pengelolaan keuangan demi kemajuan usahanya.

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) serta Kementerian Koperasi dan UKM telah mengeluarkan berbagai program, salah satunya pemanfaatan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK-EMKM) dan pemanfaatan aplikasi Lamikro guna membantu UMKM dalam penyusunan laporan keuangan hingga pemenuhan kewajiban perpajakan.⁷

Exposure Draft Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (ED SAK-EMKM) yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) dalam rapat pada tanggal 18 Mei 2016 yang kini disebut SAK EMKM pada 24 Oktober 2016 dan berlaku efektif pada 1 Januari 2018. Dalam

⁶ Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan dari usaha atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu", (Jakarta: 2018), h.7

⁷ <https://news.ddtc.id/soal-laporan-keuangan-dan-kewajiban-pajak-umkm-diimbau-manfaatkan-ini-29-192> (diakses pada tanggal 14 Mei 2022)

rangka mewujudkan UMKM Indonesia yang maju, mandiri dan modern.⁸ SAK-EMKM yang diterbitkan dapat menjadi terobosan baru bagi pelaku UMKM guna menambah pengetahuan mengelola keuangan dengan itu UMKM akan mampu membuka peluang yang lebih besar dalam melakukan pengajuan pinjaman ke pihak lembaga keuangan.

Tujuan SAK-EMKM adalah standarisasi laporan keuangan UMKM serta menjawab segala permasalahan bahwa hanya sebagian dari UMKM yang mampu mengimplementasikan standar sebelumnya yang dianggap sulit, yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP). Dengan melakukan pencatatan serta pembukuan dengan memperoleh informasi berupa laporan keuangan, maka tujuan dan kinerja dari pelaku usaha UMKM dapat dinilai. SAK-EMKM diharapkan dapat membantu UMKM dalam penyusunan laporan keuangan yang lebih mudah. SAK-EMKM haruslah diterapkan secara optimal dikarenakan tujuan SAK-EMKM diterbitkan adalah memudahkan penyusunan laporan keuangan sehingga dapat memacu pertumbuhan UMKM di Indonesia sebab literasi keuangan yang telah memadai.

Sementara itu penyusunan laporan keuangan bersumber pada SAK-EMKM sangat membantu bagi pelaku usaha kecil. Namun, kenyataannya UMKM di Indonesia masih banyak yang belum mengetahui tentang SAK-EMKM sehingga penerapannya dirasa belum optimal. Beberapa UMKM berpendapat bahwa laporan keuangan berdasarkan akuntansi tersebut tidaklah penting dan susah untuk diterapkan tetapi juga membuang-buang waktu dan biaya. Hal yang dianggap penting

⁸ Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah* (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2018), h

bagi pelaku usaha UMKM yaitu metode yang menghasilkan keuntungan (laba) yang besar tanpa harus repot dalam mempraktikkan akuntansi.

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap laporan keuangan berbasis SAK-EMKM di Parepare (Analisis Akuntansi Syariah). Apakah dengan menggunakan pendekatan analisis yang berbeda dan menyesuaikan dengan syariat islam akan memberikan simpulan berbeda atau sebaliknya. Sehingga hal ini diharapkan akan menambah literatur penelitian dan akan menjadi masukan bagi pihak yang berkepentingan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Persepsi UMKM dalam proses penyajian laporan keuangan berbasis SAK-EMKM di Parepare?
2. Bagaimana hambatan yang dihadapi oleh pelaku usaha UMKM dalam penyajian laporan keuangan berbasis SAK EMKM di Parepare?
3. Bagaimana kesesuaian SAK EMKM dengan akuntansi syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Persepsi UMKM dalam proses penyajian laporan keuangan berbasis SAK-EMKM di Parepare.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh pelaku usaha UMKM dalam penyajian laporan keuangan berbasis SAK EMKM di Parepare.
3. Untuk mengetahui bagaimana kesesuaian SAK EMKM dengan akuntansi syariah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan penelitian ini mampu meningkatkan serta memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai akuntansi yang terkait dengan penerapan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM dan terkait analisis akuntansi syariah terhadap laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi penulis, diharapkan dapat menambah pengalaman dan pengetahuan dalam menerapkan teori yang didapatkan selama perkuliahan dengan dunia kerja, sehingga dapat mengetahui lebih dalam tentang laporan keuangan.
- b. Bagi pelaku usaha, dapat menjadi informasi bagi UMKM dalam mengelolah laporan keuangannya sehingga dapat sesuai dengan SAK EMKM.
- c. Bagi akademis, diharapkan dapat dipakai sebagai acuan dalam menguji kembali variabel-variabel yang telah diteliti dan sebagai pedoman dalam melakukan penelitian yang sejenis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian Kusuma dan Lutfiany “Persepsi UMKM Dalam Memahami SAK EMKM”, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sosialisasi SAK EMKM, tingkat pendidikan pemilik, persepsi pelaku UMKM dan pemahaman akuntansi terhadap implementasi SAK EMKM pada UMKM di Kota Bogor. Dan untuk mengetahui faktor yang paling dominan dalam implementasi SAK EMKM. Desain penelitian ini menggunakan metode survey dengan teknik asosiatif kausal. Penentuan sampel menggunakan *purposive sampling* sehingga terpilih 96 pemilik UMKM di Kota Bogor. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi SAK EMKM, tingkat pendidikan pemilik, persepsi pelaku UMKM dan pemahaman akuntansi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi SAK EMKM. Secara parsial menunjukkan bahwa semua indikator berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi SAK EMKM pada UMKM di Kota Bogor. Besarnya kontribusi pengaruh sosialisasi SAK EMKM, tingkat pendidikan pemilik, persepsi pelaku UMKM dan pemahaman akuntansi terhadap implementasi SAK EMKM yaitu sebesar 57,5%. Pemahaman akuntansi merupakan variabel yang paling dominan terhadap implementasi SAK EMKM.

Persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian saat ini yaitu untuk mengetahui Persepsi UMKM terhadap SAK-EMKM. Sedangkan perbedaannya yaitu metode penelitian menggunakan metode survey dengan teknik asosiatif kausal sedangkan peneliti saat ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus, perbedaan juga terletak pada teknik analisis dimana

peneliti terdahulu menggunakan teknik analisis regresi linier berganda sedangkan penelitian saat ini menggunakan teknik analisis observasi, wawancara dan dokumentasi. Perbedaan juga terletak pada tujuan penelitian yaitu, peneliti terdahulu bertujuan untuk mengetahui pengaruh sosialisasi SAK-EMKM, tingkat pendidikan pemilik, persepsi pelaku UMKM dan pemahaman akuntansi terhadap implementasi SAK-EMKM sedangkan penelitian saat ini bertujuan mengetahui persepsi pelaku UMKM terhadap SAK-EMKM yang dilihat dari tiga indikator yaitu pemahaman laporan keuangan, penyusunan laporan keuangan dan kegunaan laporan keuangan. penelitian saat ini juga bertujuan untuk mengetahui hambatan pelaku UMKM dalam menyajikan laporan keuangan serta kesesuaian SAK-EMKM dengan akuntansi syariah.

Hasil penelitian saat ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan persepsi oleh pelaku UMKM di Kota Parepare dalam penyajian laporan keuangan berbasis SAK-EMKM, sebagian besar pelaku usaha menilai bahwa laporan keuangan sulit, rumit, menyita banyak waktu serta menambah biaya operasional jika menggunakan jasa dalam melakukan penyusunan laporan keuangan. Namun, terdapat juga beberapa pelaku usaha yang menggunakan jasa tersebut sehingga tidak menemukan masalah. Kendala utama dalam penyajian laporan keuangan berbasis SAK-EMKM adalah masih kurangnya pengetahuan serta pemahaman pelaku usaha terkait penyajian laporan keuangan sehingga diperlukan tindakan khusus oleh pemerintah terkait hal ini. Selanjutnya, laporan keuangan berbasis SAK-EMKM telah memiliki kesesuaian dengan akuntansi Syariah ditinjau dari konsep pencatatan serta prinsip.

Penelitian Kasir, “Persepsi dan Pemahaman Pelaku Usaha UMKM Terhadap Berlakunya Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah di Kota

Bandung” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi dan pemahaman pelaku usaha sentra UMKM terhadap berlakunya SAK EMKM di Sentra Usaha UMKM Kota Bandung. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah berupa data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti. Data diperoleh melalui kuesioner kepada beberapa pelaku usaha sentra UMKM di Kota Bandung. Penarikan sampel dilakukan dengan menggunakan rumus Slovin, sehingga menghasilkan responden sebanyak 336 pelaku UMKM. Adapun model regresi yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Analisa Regresi Berganda. Hasil penelitian ini secara uji t (parsial) menunjukkan bahwa persepsi pelaku UMKM tidak berpengaruh terhadap berlakunya SAK EMKM dan pemahaman pelaku UMKM berpengaruh terhadap berlakunya SAK EMKM. Sedangkan secara uji F (simultan) menunjukkan bahwa persepsi dan pemahaman pelaku UMKM berpengaruh terhadap berlakunya SAK EMKM.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini untuk mengetahui persepsi terhadap SAK-EMKM. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini untuk mengetahui persepsi dan pemahaman pelaku UMKM terhadap SAK-EMKM penelitian terdahulu menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh dari kuesioner dengan sampel 336, teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda dengan menggunakan uji t (parsial), dan uji F (simultan), sedangkan penelitian saat ini untuk mengetahui persepsi pelaku UMKM terhadap laporan keuangan menggunakan 3 indikator yaitu pemahaman laporan keuangan, penyusunan laporan keuangan dan kegunaan laporan keuangan data yang diperoleh melalui wawancara dengan pelaku UMKM dan Dinas Tenaga Kerja. Penelitian saat ini juga bertujuan untuk mengetahui hambatan pelaku UMKM dan kesesuaian SAK-EMKM dengan Akuntansi Syariah.

Hasil penelitian saat ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan persepsi oleh pelaku UMKM di Kota Parepare dalam penyajian laporan keuangan berbasis SAK-EMKM, sebagian besar pelaku usaha menilai bahwa laporan keuangan sulit, rumit, menyita banyak waktu serta menambah biaya operasional jika menggunakan jasa dalam melakukan penyusunan laporan keuangan. Namun, terdapat juga beberapa pelaku usaha yang menggunakan jasa tersebut sehingga tidak menemukan masalah. Kendala utama dalam penyajian laporan keuangan berbasis SAK-EMKM adalah masih kurangnya pengetahuan serta pemahaman pelaku usaha terkait penyajian laporan keuangan sehingga diperlukan tindakan khusus oleh pemerintah terkait hal ini. Selanjutnya, laporan keuangan berbasis SAK-EMKM telah memiliki kesesuaian dengan akuntansi Syariah ditinjau dari konsep pencatatan serta prinsip.

Penelitian Viola Syukrina E.Janrosi, “Analisis persepsi UMKM dan sosialisasi SAK-EMKM terhadap diberlakukannya laporan keuangan yang berbasis SAK-EMKM”, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi pelaku UMKM terhadap diberlakukannya Laporan keuangan yang berbasis SAK EMKM 1 Januari 2018 serta mensosialisasikan SAK EMKM terhadap pelaku UMKM yang belum mengetahui SAK EMKM. Sampel yang diambil dalam penelitian ini pelaku usaha UMKM Kecamatan Sagulung yang terdaftar di Dinas PMP-KUKM Kota Batam ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin yang berjumlah 100. Data penelitian akan diolah dengan menggunakan SPSS versi 22. Hasil dari penelitian ini Persepsi pelaku usaha mikro kecil dan menengah tidak berpengaruh signifikan terhadap penggunaan SAK EMKM. Sosialisasi SAK EMKM berpengaruh signifikan terhadap penggunaan SAK EMKM. Persepsi pelaku usaha mikro kecil dan menengah dan sosialisasi SAK EMKM berpengaruh signifikan terhadap penggunaan SAK EMKM.

Besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah 53,9% yang ditunjukkan oleh R Square yang berarti penggunaan SAK EMKM dipengaruhi oleh persepsi pelaku usaha mikro kecil dan menengah dan sosialisasi SAK EMKM sebesar 53,9% sementara 46,1 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu untuk mengetahui persepsi pelaku UMKM terhadap SAK-EMKM. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu penelitian terdahulu data yang diperoleh dari 22 sampel dan diolah dengan SPSS dengan metode penelitian deskriptif dan desain penelitian eksploratif. Sedangkan penelitian saat ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus dimana data yang diperoleh berasal dari hasil wawancara oleh pelaku UMKM dan Dinas Tenaga Kerja. Penelitian saat ini juga bertujuan untuk mengetahui hambatan pelaku UMKM dalam melakukan penyajian laporan keuangan berbasis SAK-EMKM dan kesesuaian SAK-EMKM dengan akuntansi syariah.

Hasil penelitian saat ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan persepsi oleh pelaku UMKM di Kota Parepare dalam penyajian laporan keuangan berbasis SAK-EMKM, sebagian besar pelaku usaha menilai bahwa laporan keuangan sulit, rumit, menyita banyak waktu serta menambah biaya operasional jika menggunakan jasa dalam melakukan penyusunan laporan keuangan. Namun, terdapat juga beberapa pelaku usaha yang menggunakan jasa tersebut sehingga tidak menemukan masalah. Kendala utama dalam penyajian laporan keuangan berbasis SAK-EMKM adalah masih kurangnya pengetahuan serta pemahaman pelaku usaha terkait penyajian laporan keuangan sehingga diperlukan tindakan khusus oleh pemerintah terkait hal

ini. Selanjutnya, laporan keuangan berbasis SAK-EMKM telah memiliki kesesuaian dengan akuntansi Syariah ditinjau dari konsep pencatatan serta prinsip.

Penelitian Nurul Hidayah dan Nur Syidatul Muntiah “Persepsi Pelaku UMKM Terhadap Laporan keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi UKM batik “Pring Sedapur” terhadap penyusunan keuangan laporan berdasarkan SAK ETAP di Desa Sidomukti, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan pendekatan kuantitatif yang dilakukan terhadap 3 responden. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara terstruktur, wawancara, dan studi dokumen. dan analisis data teknik menggunakan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor usia, pendidikan dan lamanya membuka usaha/pengalaman tidak menunjukkan perbedaan pendapat tentang persepsi mereka tentang penerapan akuntansi. UKM memiliki membuat pencatatan akuntansi meskipun masih sangat sederhana. Mereka belum membuat jurnal, buku besar dan menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK ETAP, karena keterbatasan pengetahuan dan informasi mengenai bagaimana menerapkan akuntansi sesuai dengan SAK ETAP.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu untuk mengetahui persepsi pelaku UMKM. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui persepsi pelaku UMKM terhadap SAK ETAP dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan teknik analisis data yaitu deskriptif sedangkan penelitian saat ini bertujuan mengetahui persepsi pelaku UMKM terhadap SAK-EMKM, hambatan pelaku UMKM dalam menyajikan laporan keuangan dan kesesuaian SAK-EMKM dengan

akuntansi syariah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, pendekatan studi kasus dimana data yang diperoleh berasal dari hasil wawancara dengan pelaku UMKM dan Dinas Tenaga Kerja.

Hasil penelitian saat ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan persepsi oleh pelaku UMKM di Kota Parepare dalam penyajian laporan keuangan berbasis SAK-EMKM, sebagian besar pelaku usaha menilai bahwa laporan keuangan sulit, rumit, menyita banyak waktu serta menambah biaya operasional jika menggunakan jasa dalam melakukan penyusunan laporan keuangan. Namun, terdapat juga beberapa pelaku usaha yang menggunakan jasa tersebut sehingga tidak menemukan masalah. Kendala utama dalam penyajian laporan keuangan berbasis SAK-EMKM adalah masih kurangnya pengetahuan serta pemahaman pelaku usaha terkait penyajian laporan keuangan sehingga diperlukan tindakan khusus oleh pemerintah terkait hal ini. Selanjutnya, laporan keuangan berbasis SAK-EMKM telah memiliki kesesuaian dengan akuntansi Syariah ditinjau dari konsep pencatatan serta prinsip.

B. Tinjauan Teori

1. Standar Akuntansi Keuangan

a. Pengertian Standar Akuntansi Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah suatu ketentuan dalam penyusunan laporan keuangan yang mengatur tentang pelaksanaan akuntansi di Indonesia, diterbitkan oleh Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) dan berlaku efektif 1 januari 2015.⁹

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 mengenai pedoman akuntansi dan pelaporan keuangan badan layanan umum, menjelaskan bahwa

⁹ iaiglobal.o.id (diakses pada tanggal 14 Mei 2022)

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) merupakan prinsip akuntansi yang digunakan di Indonesia guna menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas usaha.

Ada empat alasan mengapa standar akuntansi dibuat, yaitu:

- 1) Memberikan informasi mengenai posisi keuangan.
- 2) Memberikan pedoman dan aturan tindakan bagi para akuntan public.
- 3) Memberikan database kepada pemerintah
- 4) Standar menumbuhkan minat dalam prinsip dan teori bagi mereka yang memiliki perhatian dalam disiplin ilmu akuntansi.¹⁰

b. Standar Penyusunan Laporan Keuangan

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan-International Financial Reporting Standards (PSAK-IFRS), Standar Akuntansi Keuangan Untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP), Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK-EMKM), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK-Syariah) dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dijadikan acuan di Indonesia dalam menyajikan laporan keuangan.¹¹

Perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia seperti perusahaan publik, perbankan, emiten dan lain-lain atau perusahaan yang telah *go public* biasanya telah menggunakan PSAK. Berbeda dengan SAK-ETAP yang merupakan standar akuntansi yang digunakan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. SAK-ETAP adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik secara signifikan layaknya seperti Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK-EMKM).¹²

¹⁰ A. Riahi, Belkaoui, *Accounting Theory*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), h.34

¹¹ Cahrls T.Horngren, Walter T.Harrison, *Akuntansi Jilid 1, Edisi ke- 7*, (Jakarta: Erlangga, 2007), h.17

¹² Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan (SAK)*, (Jakarta: Dewan standar akuntansi keuangan indonesia, 2007), h.55

PSAK Syariah adalah standar akuntansi yang diterapkan oleh entitas yang menggunakan transaksi secara syariah. Standar ini dapat diterapkan oleh entitas lembaga syariah ataupun lembaga non syariah.

2. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK-EMKM)

a. Pengertian SAK-EMKM

SAK-EMKM diterbitkan pada tanggal 18 Mei 2016 oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang kemudian disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) yang diperuntukkan bagi entitas tanpa akuntabilitas publik seperti yang dijelaskan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik yang memenuhi kriteria dan definisi usaha mikro, kecil dan menengah yang telah diatur dalam perundang-undangan yang telah berlaku di Indonesia. SAK EMKM ini dinyatakan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2018.

Berdasarkan dari ruang lingkup Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK-EMKM) maka standar ini dimaksudkan untuk:

- 1) Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK-EMKM) diperuntukkan bagi entitas mikro, kecil dan Menengah.
- 2) Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah diperuntukkan bagi entitas yang tidak memenuhi kriteria yang diberlakukan oleh Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP)

Standar ini digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik, sesuai dengan ruang lingkup SAK-EMKM. Dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) dijelaskan bahwa entitas tanpa akuntabilitas publik didefinisikan sebagai entitas yang signifikan, yang memenuhi kriteria dan

definisi usaha mikro, kecil dan menengah seperti yang telah diatur dalam perundang-undangan yang telah berlaku di Indonesia.¹³

b. Tujuan SAK-EMKM

Tujuan SAK EMKM adalah untuk menyediakan informasi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapa pun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut. Pihak yang membutuhkan tidak selalu pemegang saham non manajemen, karena bentuk usaha UMKM tidak hanya PT. Namun ada banyak pihak yang membutuhkan misalnya otoritas pajak untuk kepastian penentuan besaran dan fasilitas pajak, juga banyak instansi pemerintah lain yang bermaksud memperoleh data guna keperluan pembinaan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang.¹⁴

c. Laporan Keuangan Berdasarkan SAK-EMKM

Keuangan bertujuan memberikan informasi mengenai posisi keuangan, laporan arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi pengguna dalam hal pengambilan keputusan oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus dalam memenuhi kebutuhan informasi tersebut. Pengguna yang dimaksudkan meliputi kreditor, investor serta penyedia sumber daya bagi entitas. Laporan keuangan juga bertujuan untuk menunjukkan kinerja atas apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*) atau penanggung jawab manajemen

¹³ Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), *Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Entitas Mikro, kecil dan menengah*, (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia 2016), h.40-43

¹⁴ Sri Mangesti, at al, *Akuntansi dasar sesuai dengan SAK-EMKM*, (Yogyakarta: CV Budi Utama), h.4-5

atas sumber daya yang dipercayakan. Pos-pos terdapat dalam laporan keuangan berdasarkan SAK-EMKM:¹⁵

1) Aset. Aset menurut SAK-EMKM merupakan suatu sumber daya yang dikuasai oleh entitas, diperoleh akibat dari peristiwa dimasa lalu serta potensial diharapkan untuk memperoleh manfaat dimasa yang akan datang. Aset sering kali lebih dikenal orang awam dengan sebutan harta. Aset diklasifikasikan sebagai aset lancar dan tidak lancar. Aset lancar harus diklasifikasikan sebagai berikut:

- a) Diperkirakan akan direalisasikan atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu siklus aktivitas normal suatu entitas.
- b) Dimiliki untuk diperdagangkan.
- c) Diharapkan akan direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.
- d) Berupa kas atau setara kas, kecuali dibatasi penggunaannya dari pertukaran atau digunakan untuk menyelesaikan liabilitas setidaknya 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.

Apabila tidak memenuhi syarat sebagai lancar maka aset di klasifikasikan sebagai aset tidak lancar. Contoh aset lancar antara lain, kas, sewa dibayar di muka, piutang, perlengkapan dan persediaan.

2) Liabilitas. Liabilitas menurut SAK-EMKM merupakan kewajiban saat ini oleh entitas diperoleh akibat peristiwa dimasa lalu serta penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Liabilitas diklasifikasikan menjadi liabilitas jangka

¹⁵ Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah*, (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2018), h.3-6

pendek dan jangka panjang. Liabilitas jangka pendek adalah yang memenuhi kriteria berikut:

- a) Diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi entitas.
- b) Dimiliki untuk diperdagangkan.
- c) Kewajiban akan diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.
- d) Entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas setidaknya 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.

Apabila tidak memenuhi kriteria liabilitas jangka pendek maka suatu liabilitas diklasifikasikan jangka panjang. Contoh liabilitas jangka pendek yaitu piutang usaha, dan pendapatan diterima di muka. Sedangkan liabilitas jangka panjang yaitu utang hak jangka panjang dan penerbitan obligasi.¹⁶

- 3) Penghasilan. Penghasilan atau biasa disebut dengan pendapatan merupakan penghasilan yang didapatkan dari suatu aktivitas baik berupa sewa, royalti, penjualan, imbalan dan deviden.
- 4) Beban. Beban merupakan suatu aktivitas yang timbul dari entitas seperti, beban penyusutan, beban sewa, beban upah dan lain sebagainya.¹⁷

Bagian-bagian yang terdapat dalam laporan keuangan berdasarkan SAK-EMKM meliputi:

¹⁶ Sri Mangesti, at al, *Akuntansi dasar sesuai dengan SAK-EMKM*, (Yogyakarta: CV Budi Utama), h.13-14

¹⁷ Amir Hasan dan Gusnadir, *PROSPEK IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI : Entitas Mikro, Kecil Dan Menengah Berbasis Kualitas Laporan Keuangan Yang Berlaku Efektif Per 1 Januari 2018*, (Bandung: Sadaripress, 2018), h.13-14

1) Laporan Posisi Keuangan.

SAK-EMKM tidak menentukan urutan ataupun format pos-pos yang di gunakan. Jika penyajian laporan posisi keuangan relevan dan mudah untuk dipahami posisi/ keuangan entitas maka entitas dapat menyajikan pos serta bagian dari pos dalam laporan keuangan. Entitas dapat juga menyajikan pos-pos aset berdasarkan liabilitas dan likuiditas berdasarkan pada urutan jatuh temponya. Pos-pos yang dimaksud dalam hal ini adalah kas, aset tetap, ekuitas, piutang, persediaan, utang usaha, dan utang bank.

2) Laporan Laba Rugi.

Laporan laba rugi berdasarkan SAK-EMKM meliputi pos pendapatan, bebas keuangan dan beban pajak. Dalam laporan laba rugi semua penghasilan dan bebas diakui dalam suatu periode, terkecuali jika SAK-EMKM mensyaratkan hal lain. SAK EMKM mengatur perlakuan atas dampak koreksi atas kesalahan dan perubahan kebijakan akuntansi yang disajikan sebagai penyesuaian retrospektif terhadap periode yang lalu dan bukan sebagai dari laba atau rugi dalam periode terjadinya perubahan.

3) Catatan Atas Laporan Keuangan.

Catatan laporan keuangan berdasarkan SAK-EMKM meliputi:

- (a) Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK-EMKM.
- (b) Ikhtisari dari kebijakan akuntansi.

- (c) Informasi tambahan dari rincian pos tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material.¹⁸

3. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

a. Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, ada beberapa definisi:

- 1) Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- 2) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
- 3) Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- 4) Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih

¹⁸ Ikatan Akuntan Indonesia , *Exposure draft standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah*,. (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2016), h.8-9

besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.¹⁹

b. Tujuan dan Asas UMKM

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) bertujuan untuk meningkatkan pembentukan lapangan pekerjaan, pengentasan rakyat dari kemiskinan, pemerataan pendapatan serta membantu dalam pembangunan daerah. UMKM diharapkan dapat mewujudkan ekonomi yang adil, mandiri, seimbang serta tangguh.

UMKM bertujuan menumbuhkan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan selain dari pada mengembangkan dan menumbuhkan usahanya sendiri. UMKM mempunyai asas-asas yang terdiri dari:

- 1) Kekeluargaan.
- 2) Kebersamaan.
- 3) Demokrasi ekonomi.
- 4) Efisiensi keadilan.
- 5) Berkelanjutan.

c. Kriteria UMKM

UMKM mendapat perhatian serta keistimewaan sebagai penggerak perekonomian bangsa yang diamanatkan oleh UU, antara lain:

- 1) Bantuan kredit usaha dengan bunga rendah.
- 2) Kemudahan persyaratan izin usaha.
- 3) Bantuan pengembangan usaha dari lembaga pemerintah.

UMKM juga memiliki ciri-ciri, antara lain:

¹⁹ Republik Indonesia, “Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah”, (Jakarta: 2008), h.2

- 1) Manajemen berdiri sendiri.
- 2) Daerah pemasarannya lokal.
- 3) Aset perusahaannya kecil.
- 4) Jumlah karyawan yang dipekerjakan terbatas.²⁰

Sebagaimana yang diatur dalam PP No.07 Tahun 2021 yang menyebutkan bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat digolongkan sebagai berikut:²¹

Tabel 1.2 Kriteria UMKM

Jenis	Aset & Modal	Omset
Mikro	Rp 0 – Rp 1.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan	Penjualan tahunan paling banyak Rp 2.000.000.000
Kecil	Rp 1.000.000.000 – Rp 5.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan	Penjualan tahunan Rp 2.000.000.000 – Rp 15.000.000.000
Menengah	Rp 5.000.000.000 – Rp 10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan	Penjualan tahunan Rp 15.000.000.000 – Rp 50.000.000.000

Sumber : Data Kriteria UMKM PP No.7 Tahun 2021

d. UMKM Dalam Prespektif Syariah.

Mengenai konsep kewirausahaan (*entrepreneurship*), islam tidak memberikan penjelasan yang detail mengenai kosnsep tersebut. Namun memiliki kaitan yang sangat

²⁰ Tulus Tambunan, *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), h.166

²¹ Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah”, (Jakarta: 2021), h.51-52

erat, meski bahasa teknis yang digunakan berbeda. Kemunculan Islam di Indonesia juga dibawa dan disebar luaskan oleh para pedagang. Selain menyebarkan ilmu agama, para pedagang juga mewariskan keahlian berdagang kepada masyarakat pesisir.

Etos bisnis yang dimiliki umat islam sangatlah tinggi, islam dan dagang diibaratkan dua sisi dari satu keping mata uang. Seperti dalam Q.S Al-Hasyr/59:7 :

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Terjemahnya:

“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.”²²

Ayat ini menjelaskan bahwa kita dapat belajar bahwa aktivitas perekonomian hendaklah melibatkan kelompok masyarakat menengah bawah, yang merupakan mayoritas penduduk disuatu negara. Seperti yang disebutkan dalam Q.S Al-Hasyr/59:7 bahwa Allah Swt. melarang berputarnya harga hanya dikalangan orang kaya saja. Oleh karena itu dengan adanya UMKM dapat menolong kaum lemah secara bersama-sama. Sebuah studi pernah dilakukan di Michigan State University

²² Departemen Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Solo: Tiga Serangkai, 2014), h.912

AS, bahwa UMKM telah memberikan kontribusi yang sangat berharga dan secara nyata di sejumlah negara dalam menciptakan dan memperluas lapangan pekerjaan juga meningkatkan pendapatan.²³ UMKM dapat menjadi pilihan yang tepat bagi pemerintah baik pusat maupun daerah serta membangun kemandirian UMKM adalah sebuah kewajiban.

4. Akuntansi Syariah

a. Pengertian Akuntansi Syariah

Syariah merupakan aturan yang ditetapkan Allah Swt. untuk di patuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas kehidupan di dunia. Dalam menjalankan kehidupan manusia tidak akan lepas dari aktivitas dan kegiatan akuntansi.²⁴

Akuntansi dalam bahasa arabnya disebut “Muhasabah” yang berasal dari kata hasaba, hasiba, muhasabah atau wazan yang lain adalah hasaba, hasban, hisabah yang artinya menimbang, memperhitungkan, mengkalkulasikan, mendata, atau menghisab. Bisa diartikan juga menghitung dengan seksama atau teliti yang harus dicatat dalam pembukuan tertentu.

Akuntansi syariah adalah kegiatan indentifikasi, klarifikasi dan pelaporan dalam pengambilan keputusan ekonomu berdasarkan prinsip akad-akad syariah yaitu yang tidak mengandung *zhulum* (Kezaliman), *riba*, *masyir* (judi), *gharar* (penipuan), barang yang haram dan membahayakan. Akuntansi syariah adalah akuntansi yang berorientasi sosial. Artinya akuntansi tidak hanya sebagai alat untuk menterjemahkan

²³ M.Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, terjemahan: Ikhwan Abidin Basri, (Jakarta: Gema Insani,2000), h.16

²⁴ Diah Nurdiwaty, Linawati, *Buku Ajar Akuntansi Syariah*, (Kediri: Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2020), h.1

fenomena ekonomi dalam bentuk ukuran moneter tetapi juga sebagai suatu metode menjelaskan bagaimana fenomena ekonomi itu berjalan dalam masyarakat islam.²⁵

Ikatan Akuntan Indonesia berpendapat bahwa syariah adalah hukum islam yang bertujuan mengendalikan kegiatan umat manusia yang berisi perintah maupun larangan, baik yang menyangkut dengan hubungan sesama makhluk. Prinsip syariah berlaku secara universal dalam aktivitas muamalah dan mengikat secara hukum untuk pelaku serta untuk kepentingan *stakholder* yang melaksanakan transaksi syariah.²⁶

Pandangan Islam mengenai Akuntansi Syariah dalam Q.S Al-Muthaffifin/83:

1-3 :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Terjemahnya:

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.”²⁷

Ayat ini menjelaskan tentang larangan perbuatan curang yakni dalam hal curang dalam menimbang atau menakar. Sama halnya dengan akuntansi syariah yang melarang perbuatan curang, dalam akuntansi perbuatan curang. Beberapa kecurangan dalam akuntansi yang menyebabkan suatu perusahaan mengalami

²⁵ Muammar Khadafi, at al, *Akuntansi Syariah: Meletakkan Nilai-Nilai Islam Dalam Ilmu Akuntansi*, (Medan: Madenatera, 2016), h.1-13

²⁶ Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), h.25

²⁷ Departemen Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Solo: Tiga Serangkai, 2014), h.587

kendala dalam pelaporan keuangannya. Praktek *earning management* dilarang dalam akuntansi syariah kecuali untuk mendatang *mashlaha* dan menghindari *mudharat*.²⁸

b. Prinsip-prinsip Akuntansi Syariah

Allah Swt. telah menggariskan konsep akuntansi yang memberikan penekanan pada kebenaran, keadilan dan pertanggung jawaban. Dari ketiga konsep tersebut sudah memiliki prinsip yang mendasar dalam operasional akuntansi syariah. berikut penjelasan dari ketiga prinsip yang ada dalam Q.S Al-Baqarah/2:282 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدٰىنْتُمْ بٰدِيْنَ اِلَىٰ اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
 كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي
 عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَاِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ
 ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيْهُ بِالْعَدْلِ ؕ وَاَسْتَشْهِدُوْا شٰهِدَيْنِ مِنْ
 رِّجَالِكُمْ ؕ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ اَنْ تَضَلَّ
 اِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدَاهُمَا الْاٰخَرٰى وَلَا يَأْب الشُّهَدَآءُ اِذَا مَا دُعُوْا وَلَا تَسْمَعُوْا اَنْ
 تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلَىٰ اَجَلِهٖ ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمٌ لِلشُّهَدَةِ وَاَدْنٰى اِلَّا
 تَرَ تَابُوْا ؕ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تَجْرَةً حَآضِرَةً تُدِيرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اِلَّا
 تَكْتُبُوْهَا وَاَشْهَدُوْا اِذَا تَبَايَعْتُمْ ؕ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ؕ وَاِنْ تَفَعَّلُوْا فَاِنَّهٗ فُسُوْقٌ
 بِكُمْ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun

²⁸ <http://akuntansikeuangan.com/ayat-al-quran-landasan-akuntansi-syariah/> ,(diakses pada
 senin,07 juni 2021)

daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akal nya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”²⁹

1) Prinsip pertanggung jawaban.

Prinsip pertanggung jawaban merupakan konsep yang tidak asing di kalangan masyarakat muslim. Pertanggung jawaban sering dikaitkan dengan konsep amanah. Bentuk pertanggung jawaban dalam akuntansi yaitu berupa bentuk laporan akuntansi.

2) Prinsip keadilan.

Dalam akuntansi prinsip keadilan diartikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan dicatat dengan benar. Hal ini berkaitan dengan praktik moral yang berupa kejujuran. Sebab kejujuran bersifat fundamental serta berpijak pada nilai etika, syariah dan moral.

²⁹ Departemen Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Solo: Tiga Serangkai, 2014), h.70

3) Prinsip Kebenaran.

Prinsip kebenaran ini sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dengan keadilan. Sebagai contoh dalam akuntansi kita senantiasa dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran dan pelaporan. Kegiatan ini bisa dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran dalam Al-Qur'an tidak diperbolehkan untuk dicampurkan dengan kebathilan. Kebenaran ini bisa menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur serta melaporkan transaksi ekonomi.³⁰

c. Tujuan Akuntansi Syariah

Tujuan akuntansi syariah adalah merealisasikan kecintaan utama kepada Allah swt. dengan melaksanakan akuntabilitas ketundukan dan kreativitas, atas transaksi-transaksi, kejadian-kejadian ekonomi serta proses produksi dalam organisasi, yang penyampaian informasinya bersifat material, batin maupun spiritual, sesuai nilai-nilai Islam dan tujuan syariah. Secara umum tujuan akuntansi syariah mencakup:

- 1) Membantu mencapai keadilan sosio- ekonomi (*Al Falah*)
- 2) Mengenal sepenuhnya kewajiban kepada Tuhan, masyarakat, individu sehubungan dengan pihak-pihak yang terkait pada aktivitas ekonomi yaitu akuntan, auditor, manajer, pemilik, pemerintah dsb sebagai bentuk ibadah.³¹

³⁰ Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah Edisi 2*, (Jakarta:Salemba Empat 2005), h.11-12

³¹ Muammar Khadafi, at all. *Akuntansi Syariah: Meletakkan Nilai-Nilai Islam Dalam Ilmu Akuntansi*,(Medan: Madenatera, 2016), h.2

5. Persepsi

a. Pengertian Persepsi

Secara epistemologi, persepsi atau dalam bahasa Inggris *Perception* berasal dari kata baha latin *perceptio*, dari bahasa *percipere* yang artinya menerima atau mengambil. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.³²

Persepsi adalah proses yang digunakan oleh seseorang atau individu untuk memilih mengorganisasi dan menginterpretasi masukan-masukan informasi guna menciptakan gambaran dunia yang memiliki arti. Persepsi tidak hanya bergantung pada rangsangan fisik tetapi juga pada rangsangan yang berhubungan dengan lingkungan sekitar dan keadaan individu yang bersangkutan.³³

Persepsi merupakan proses individu atau kosumen dalam memilih dan menginterpretasikan atau memaknai masukan-masukan informasi yang dapat menciptakan gambaran objek yang memiliki kebenaran yang bersifat subjektif atau personal, memiliki arti tertentu, dapat dirasakan baik secara selektif, distorsi ataupun retensi.³⁴

Dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan proses yang didahului oleh rangsangan atau penginderaan berupa pengingat, pengamatan dan mengidentifikasi suatu objek.

C. Tinjauan Konseptual

Judul skripsi ini adalah “Persepsi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Laporan Keuangan Berbasis SAK-EMKM di Parepare (Analisis

³² Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Komunikasi, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2011), h.51

³³ Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran* Edisi Milenium. (Jakarta:Indeks, 2002), h.164

³⁴ Hasan Ali, *Marketing*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2009), h.63

Akuntansi Syariah)” sebagai alur pikir dalam penelitian ini maka peneliti akan jelaskan mengenai pengertian dari judul yang peneliti angkat agar tidak terjadi kesalah pahaman dan memudahkan pemahaman terhadap isi pembahasan. Oleh karena itu dibawah akan diuraikan tentang pembahasan makna judul tersebut.

1. Persepsi merupakan proses yang didahului oleh ransangan atau penginderaan berupa pingingat, pengamatan dan mengidentifikasi suatu objek.
2. Standar Akuntansi Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK-EMKM) adalah SAK EMKM merupakan standar akuntansi keuangan yang dibuat sederhana dan dapat digunakan oleh entitas yang memenuhi definisi entitas tanpa akuntabilitas publik karena mengatur transaksi umum yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan EMKM.
3. Laporan Keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas dari perusahaan tersebut.³⁵
4. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam UU No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Usaha Mikro.³⁶
5. Analisis adalah suatu usaha untuk mengurai suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian (*decomposition*) sehingga susunan/tatanan bentuk suatu

³⁵ Munawir, *Analisis Laporan Keuangan Edisi 4*,(Yogyakarta:Liberty, 2010), h.2

³⁶ Republik Indonesia, “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, (Jakarta: , 2008), h.2

yang diurai itu tampak dengan jelas dan karenanya bisa secara lebih terang ditangkap maknanya atau lebih jernih untuk dimengerti duduk perkaranya.³⁷

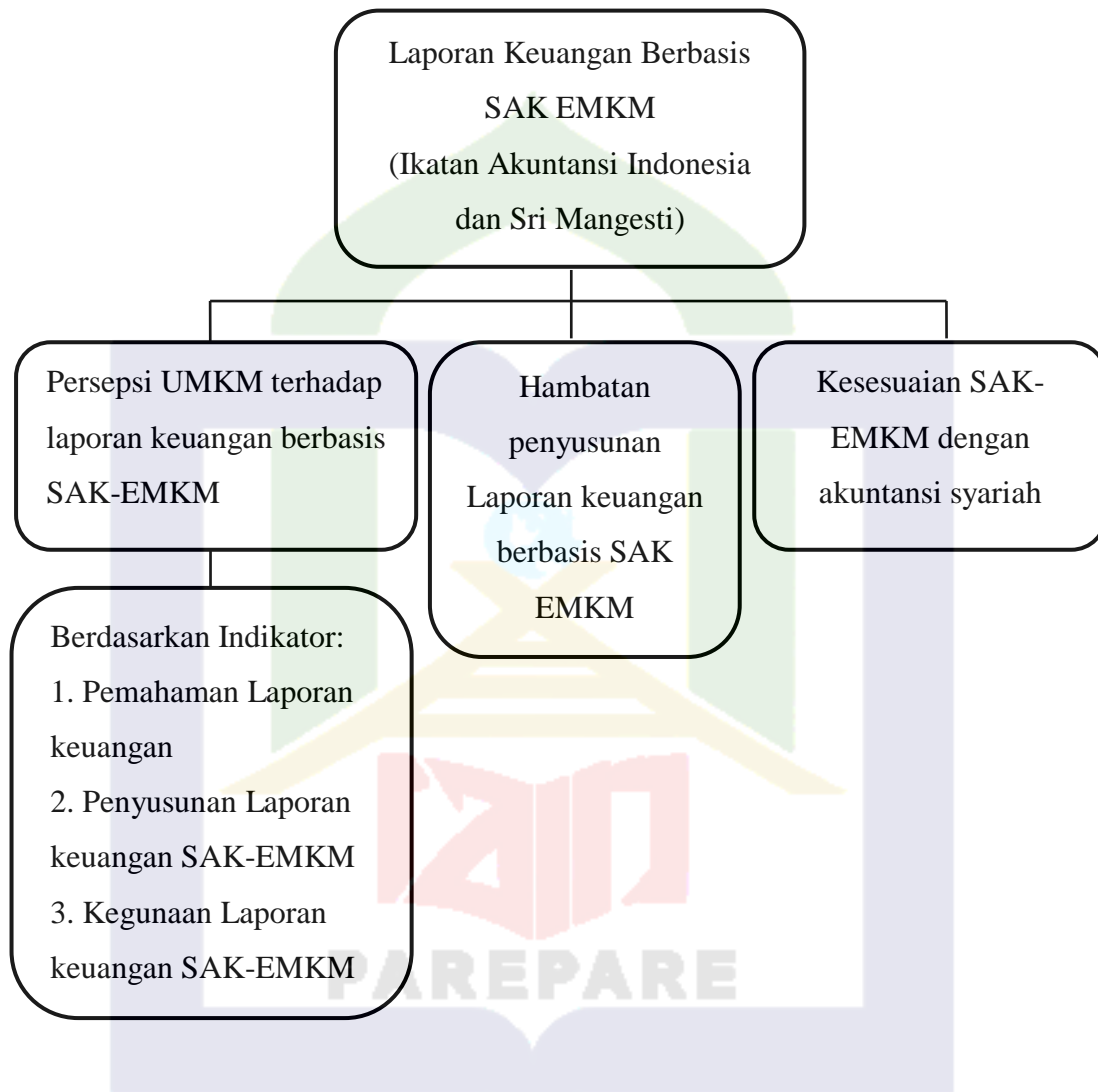
6. Akuntansi Syariah kegiatan pencatatan terhadap data-data historis yang bersifat moneter berdasarkan nilai-nilai Islam dan konsep-konsep yang diterapkan dalam Al-Qur'an dan berguna untuk memberikan informasi keuangan yang digunakan untuk pengambilan keputusan oleh para pemakai.³⁸



³⁷ Aan Komariyah, Djama'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Alfabeta, 2014), h.200

³⁸ Nurhayati, wasilah. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. (Jakarta:Salemba Empat. 2009), h.2

D. Bagan Kerangka Berpikir



Gambar 2.1 Bagan kerangka berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode-metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan dan analisis data. Maka dapat penulis uraikan sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Merujuk pada permasalahan yang penulis angkat dalam pembahasan ini maka penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena social dan masalah manusia, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif yakni: mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisa, serta menginterpretasikan seluruh data primer dan sekunder yang diperoleh.³⁹

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kasus (*case study*) adalah salah satu bentuk penelitian kualitatif yang berbasis pada pemahaman dan perilaku manusia berdasarkan pada opini manusia.

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung :Alfabeta. 2008)

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi pada penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat pelaksanaan penelitian adalah UMKM yang berada di Parepare baik itu berupa cafe atau warkop, warung makan, pedagang kaki lima, toko kelontong dan lain sebagainya.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang akan peneliti gunakan dalam merampungkan penelitian ini kurang lebih 30 hari.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan judul penulis maka akan difokuskan untuk melakukan penelitian mengenai persepsi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mengenai laporan keuangan berbasis SAK-EMKM dengan objek penelitian yaitu UMKM di Parepare.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Data primer disini merupakan data-data yang diperoleh dari hasil pertanyaan melalui wawancara yang diberikan kepada pemilik dan pengurus UMKM, berupa usaha cafe ataupun warkop, warung makan, toko kelontong, dan pedagang kecil lainnya.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh

peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.⁴⁰ Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi pada UMKM yang berwujud laporan. Adapun data skunder yang diperoleh dari penelitian ini berupa bukti-bukti transaksi, pencatatan laporan keuangan yang dilakukan oleh UMKM.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun tehnik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini antara lain:

1. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara terbuka dengan pihak-pihak yang terkait seperti pemilik dari UMKM.

2. Dokumentasi

Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Yaitu cacatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Misalnya catatan harian, biografi, foto, sketsa dan lain-lain.⁴¹ Serta studi dokumen, misalnya nota, catatan keuangan, struktur organisasi, *jobdescription*, dan dokumen lain yang terkait.

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h.137

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h.240-371

F. Uji Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif.⁴²

Uji Keabsahan data ini dilakukan untuk membuktikan bahwa penelitian yang dilakukan benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi, uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.⁴³

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggung jawabkan sebagai penelitian ilmiah dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan.

1. *Credibility*

Uji *credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan.

a. Perpanjangan Pengamatan

Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang ditemui maupun sumber data yang lebih baru. Perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan hubungan antara peneliti dengan sumber akan semakin terjalin, semakin akrab, semakin terbuka, timbul kepercayaan, sehingga dapat memperoleh informasi yang lebih terperinci dan lengkap.

⁴² Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h.320

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), h.270

Perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh. Data yang diperoleh setelah dicek kembali ke lapangan benar atau tidak, ada perubahan atau masih tetap sama. Setelah dicek kembali ke lapangan data yang telah diperoleh sudah dapat dipertanggung jawabkan/benar berarti kredibel, maka perpanjangan pengamatan perlu diakhiri

b. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian

Meningkatkan kecermatan atau ketekunan secara berkelanjutan maka kepastian data dan urutan kronologis peristiwa dapat dicatat atau direkam dengan baik dan sistematis. Meningkatkan kecermatan merupakan salah satu cara mengontrol atau mengecek pekerjaan apakah data yang telah dikumpulkan, dibuat, dan disajikan sudah benar atau belum.

Untuk meningkatkan ketekunan peneliti dapat dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh. Dengan cara demikian, maka peneliti akan semakin cermat dalam membuat laporan yang pada akhirnya laporan yang dibuat akan semakin berkualitas.

c. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

1) Triangulasi Sumber. Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*) dengan tiga sumber data.

2) Triangulasi Teknik. Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti dapat melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

3) Triangulasi Waktu. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.

d. Analisis Kasus Negatif

Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti masih mendapatkan data yang bertentangan dengan data yang ditemukan, maka peneliti mungkin akan mengubah temuannya.

e. Menggunakan Bahan Referensi

Yang dimaksud referensi adalah pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya.

f. Mengadakan *Membercheck*

Tujuan *membercheck* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jadi tujuan *membercheck* adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan.

2. *Transferability*

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil.⁴⁴

Pertanyaan yang berkaitan dengan nilai transfer sampai saat ini masih dapat diterapkan/dipakai dalam situasi lain. Bagi peneliti nilai transfer sangat bergantung pada si pemakai, sehingga ketika penelitian dapat digunakan dalam konteks yang berbeda di situasi sosial yang berbeda validitas nilai transfer masih dapat dipertanggungjawabkan.

3. *Dependability*

Penelitian yang *dependability* atau reliabilitas adalah penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula.

Pengujian *dependability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dengan cara auditor yang independen atau pembimbing yang independen mengaudit keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Misalnya bisa dimulai ketika bagaimana peneliti mulai menentukan masalah, terjun ke lapangan, memilih sumber data,

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), h.273-276

melaksanakan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai pada pembuatan laporan hasil pengamatan.

4. *Confirmability*

Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji *confirmability* penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.

Validitas atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggung jawabkan.

G. Teknik Analisis Data

Proses menganalisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Adapun tahapan proses analisis data adalah sebagai berikut:

Setelah data terkumpul dari hasil wawancara/ interview dan dokumentasi (berupa laporan keuangan), maka dalam menganalisis data penulis mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mengumpulkan data. Penelitian ini akan memperoleh sumber data berupa wawancara, dokumentasi, dan penelusuran beberapa data.

2. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Setelah peneliti melakukan wawancara dengan subyek atau narasumber, peneliti selanjutnya merangkum dari hasil wawancara, memilih data atau informasi berdasarkan apa yang kita cari atau berdasarkan rumusan masalah yang peneliti tentukan.

3. Penyajian Data

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, flowchart dan sejenisnya. Pada langkah menganalisis ini, peneliti menyajikan data dalam bentuk uraian singkat atau mengkategorikan agar data yang peroleh lebih jelas.

4. Verifikasi dan penarikan kesimpulan.

Dimana peneliti melakukan interpretasi dan penetapan makna dari data yang tersaji. Kegiatan ini dilakukan dengan cara komparasi dan pengelompokkan. Data yang tersaji kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan sementara. Kesimpulan sementara tersebut senantiasa akan terus berkembang sejalan dengan pengumpulan data baru dan pemahaman baru dari sumber data lainnya, sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan yang benar-benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya untuk menjadi data yang valid dalam penulisan serta kesimpulan-kesimpulan yang tidak berlebihan atau kekurangan.⁴⁵

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h.246

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Persepsi UMKM Dalam Proses Penyajian Laporan Keuangan Berbasis SAK-EMKM Di Parepare

Penyajian laporan keuangan SAK-EMKM dinyatakan mampu membantu dan memudahkan pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan. Selain dari pada itu laporan keuangan juga mampu memberikan informasi mengenai kondisi usaha, memberikan kemudahan bagi UMKM dalam mengawasi, mengevaluasi serta mengendalikan kondisi keuangan dalam usahanya.

Tabel 1.3 Data UMKM yang di teliti

No.	Nama Usaha	Jenis Usaha	Alamat
1.	US. Putra Jaya	Dagang	Kec. Bacukiki
2.	KMD Racing Team	Jasa	Kec. Ujung
3.	Rumah Makan Pariaman Laweh	Dagang	Kec. Ujung
4.	Cemilan Sultan	Dagang	Kec. Soreang
5.	Toko SAR	Dagang	Kec. Ujung
6.	Hj.Nurmi Collection	Dagang	Kec. Soreang
7.	Kedai SunBox	Dagang	Kec. Soreang
8.	Barber Madura	Jasa	Kec. Soreang
9.	Gold Laundry	Jasa	Kec. Bacukiki

Sebanyak 9 UMKM yang telah diwawancarai dengan melihat berbagai indikator seperti berikut:

1) Pemahaman Laporan keuangan.

Dilihat dari banyak responden yang diwawancarai terhadap pemahaman laporan keuangan mengatakan bahwa pelaku UMKM hanya sebagian kecil pelaku UMKM yang memahami laporan keuangan, sebagiannya lagi belum memahami serta tidak mengetahui laporan keuangan. Hasil wawancara menegaskan bahwa laporan keuangan sangat sulit untuk dipahami oleh pelaku UMKM sebab ada beberapa nama akun ataupun model penyusunan yang belum dipahami ataupun diketahui.

Wawancara dilakukan dengan Pak Eksan selaku pemilik US. Putra Jaya juga mengatakan dalam hasil wawancara bahwa

“Sangat sulit untuk memahami laporan keuangan. Saya juga belum mengetahui mengenai dasar akuntansi. Yang dilakukan hanya mengumpulkan bukti transaksi untuk mengetahui harga ecer dan sebagai tanda bukti pengeluaran. Jika ingin membuat laporan keuangan saya hanya meminta bantuan kepada orang terdekat yang paham tentang laporan keuangan”

Wawancara dilakukan dengan Ibu Ria selaku pemilik laundry gold juga mengatakan dalam hasil wawancara bahwa

“Belum terlalu memahami laporan keuangan secara akuntansi maka dari itu saya memperkerjakan karyawan yang paham mengenai akuntansi dasar”

Hasil wawancara juga menyatakan sebagian pelaku UMKM hanya memahami pencatatan laporan keuangan yang disusun secara sederhana. Pemahaman pelaku UMKM terhadap laporan keuangan masih sangat minim.

Wawancara dilakukan dengan Pak Hendra selaku pendamping bidang UMKM Dinas Tenaga Kerja mengatakan dalam hasil wawancara bahwa

“Secara pemahaman, bisa dilihat UMKM yang tergolong kecil atau mikro sudah pasti belum memahami apa itu laporan keuangan baik yang sesuai dengan akuntansi ataupun SAK-EMKM. Sebagian dari UMKM hanya melakukan pencatatan sederhana saja berupa pemasukan dan pengeluaran. Berbeda dengan UMKM yang tergolong menengah keatas yang sudah melakukan pencatatan laporan keuangan, laporan keuangan yang dibuat pun hanya sesuai dengan kebutuhan dari UMKM.”

Hasil wawancara yang dilakukan di Dinas Tenaga Kerja mempertegas bahwa tidak semua UMKM yang terdapat di Kota Parepare belum memahami mengenai laporan keuangan baik yang sesuai dengan akuntansi ataupun SAK-EMKM.

2) Penyusunan Laporan keuangan

Hasil wawancara mengatakan bahwa penyusunan laporan keuangan masih banyak belum dilakukan oleh UMKM. Pak Ahmad selaku pemilik warung makan pariaman laweh juga mengatakan dalam hasil wawancara yang dilakukan bahwa

“Hanya ada bukti transaksi yang disusun serta penyusunan laporan keuangan yang dilakukan masih berupa laporan keuangan yang sederhana”

Hasil wawancara juga menyatakan bahwa sebagian UMKM menyimpan bukti transaksi yang disusun atau dicatat belum sesuai dengan standar akuntansi. Beberapa responden juga berpendapat bahwa laporan keuangan berbasis SAK-EMKM tidak perlu dilakukan dikarenakan usaha yang dilakoni atau dijalankan berawal dari modal yang kecil dan tidak terlalu mendesak untuk dilakukan. Sebagian dari pelaku UMKM sama sekali tidak mengetahui proses penyusunan

laporan keuangan dan menganggap bahwa hal tersebut sulit, susah dan rumit untuk dipelajari serta keterbatasan informasi mengenai laporan keuangan. Pelaku UMKM juga tidak mengetahui mengenai komponen terdapat didalam laporan keuangan berbasis SAK-EMKM.

Wawancara dilakukan dengan Pak Hendra selaku pendamping bidang UMKM Dinas Tenaga Kerja mengatakan dalam hasil wawancara bahwa

“Penyusunan laporan keuangan belum sepenuhnya dilakukan oleh UMKM yang berada di Kota Parepare. UMKM merasa bahwa laporan keuangan terlalu rumit untuk dilakukan terutama UMKM yang tergolong mikro dan kecil. Biasanya UMKM hanya melakukan pencatatan kas masuk dan keluar yang dicatat dalam buku, atau UMKM yang sudah memakai aplikasi yang secara otomatis akan tercatat itupun hanya masih dalam bentuk yang sederhana juga. Biasanya laporan keuangan yang dibuat oleh UMKM hanya sebatas sdengan yang dibutuhkan saja.”

Hasil wawancara yang dilakukan di Dinas Tenaga Kerja mempertegas bahwa penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh UMKM hanya sebatas pencatatan sederhana saja. Sebagian dari UMKM juga hanya mencatat kas masuk dan keluar.

3) Kegunaan Laporan keuangan SAK-EMKM.

Hasil wawancara pelaku UMKM tidak mengetahui kegunaan laporan keuangan berbasis SAK-EMKM. Pak Fengky selaku pemilik bengkel racing motor juga mengatakan dalam hasil wawancara yang dilakukan bahwa

“Laporan keuangan sebenarnya sangat berguna untuk digunakan oleh UMKM, dikarenakan laporan keuangan bisa memberikan informasi terhadap kondisi keuangan usaha. Tetapi untuk menyusun laporan keuangan itu sendiri dirasa masih sangat sulit dan rumit untuk dipahami.”

Wawancara dilakukan dengan Pak Hendra selaku pendamping bidang UMKM Dinas Tenaga Kerja dalam wawancaranya bahwa

“Ada banyak kegunaan laporan keuangan bagi UMKM. Selain dari pada memberikan informasi keuangan usaha, laporan keuangan juga membantu UMKM mendapatkan bantuan baik dari pihak perbankan maupun pemerintah.”

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa ada banyak kegunaan laporan keuangan bagi UMKM. Hanya saja masih banyak UMKM yang belum paham mengenai laporan keuangan.

2. Hambatan Yang Dihadapi Oleh Pelaku Usaha UMKM Dalam Penyajian Laporan Keuangan Berbasis SAK-EMKM Di Parepare

Hasil wawancara dengan 9 UMKM yang ada di Kota Parepare bahwa hambatan atau kendala terbesar UMKM dalam melakukan penyajian laporan keuangan berbasis SAK-EMKM adalah keterbatasan informasi mengenai laporan keuangan. Dari wawancara ibu Wati selaku pemilik toko cemilan sultan juga mengatakan dalam wawancaranya bahwa

“Saya belum mengetahui apa itu laporan keuangan berbasis SAK-EMKM. Mengetahui laporan keuangan sesuai akuntansi saja dirasa masih agak menyulitkan. Saya rasa kendala nya itu adalah kurang paham mengenai laporan kuangan”

Wawancara dilakukan dengan Pak Hendra selaku pendamping bidang UMKM Dinas Tenaga Kerja dalam wawancaranya bahwa

“Kendala atau hambatan dari UMKM dalam melakukan penyajian laporan keuangan itu minimnya pemahaman dan pengetahuan serta latar belakang akuntansi. Untuk menyusun laporan keuangan biasanya dibutuhkan kemampuan dalam menguasai komputer sebab untuk melakukan penyusunan laporan keuangan secara

manual UMKM akan merasa bahwa itu menyusahkan. Sedangkan kemampuan tersebut masih banyak UMKM yang belum menguasainya.”

Hal ini dipertegas dari hasil wawancara dengan Pak Hendra selaku pendamping UMKM Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare bahwa hambatan pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan adalah pemahaman mengenai kaporan keuangan itu sendiri serta pengetahuan dalam penyajian laporan keuangan.

3. Kesesuaian SAK EMKM Dengan Akuntansi Syariah

SAK (Standar Akuntansi Keuangan) adalah standarisasi yang dibentuk oleh DSAK (Dewan Standar Akuntansi Keuangan) yang sewaktu-waktu dapat berubah seiring dengan perkembangan perokomian. Berbeda dengan aturan atau standar yang terdapat pada Al-Qur'an, akuntansi syariah merupakan akuntansi yang dikenal dalam islam yang mengarah serta merujuk terhadap aturan yang sesuai dengan tuntutan dan nilai-lain yang terkandung didalam Al-Qur'an ataupun hadist mengenai informasi keuangan. Sebagaimana yang terkandung dalam Q.S. Al-Baqarah/2:282 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya.

Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Bermuamalah ialah seperti berjual beli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya.”⁴⁶

Ayat tersebut menjelaskan mengenai masalah muamalah, dimana mencakupi kegiatan jual beli dan utang piutang. Dapat diartikan juga bahwa islam memberikan aturan-aturan dalam bertransaksi diantara manusia, menjelaskan tentang cara menjaga dan memelihara hak-hak, menjelaskan tentang cara melakukan transaksi

⁴⁶ Departemen Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Solo: Tiga Serangkai, 2014), h.70

dagang. Di surah Al-Baqarah ayat 282 Allah Swt. menjelaskan tentang cara penulisan surat tanda bukti dan menjelaskan siapa saja yang berhak untuk melakukannya, yaitu hendaknya juru tulis surat tanda bukti tersebut orang yang dapat dipercaya, adil, tidak memihak salah satu pihak, cerdas serta cermat. Surat tanda bukti haruslah ditulis dengan benar dan jujur. Hal ini menunjukkan bahwa mencatat utang yang ada sebagai salah satu penguat didalam pembuktian.

Hikmah dibalik larangan dan perintah yang di berikan oleh Allah Swt. berkaitan dengan masalah ini. Dengan adanya bukti dalam bentuk tertulis dan lisan (saksi) bisa lebih menjamin kebenaran didalam pelaksanaan hukum Allah Swt. karena bukti tertulis dan lisan tersebut lebih dengan dengan kebenaran dan dijauhkan dari kebohongan atau manipulasi. Kemudian Al-Qur'an memberikan keringanan dari keterikatan perintah mencatat utang atau transaksi, melihat tuntutan-tuntutan bisnis atau transaksi yang ada juga membutuhkan kebebasan dan kecepatan. Meskipun pencatatan transaksi tidak dituntut untuk dilakukan, namun tetap dianjurkan. Karena terkadang bisa saja salah satu pihak yang melakukan serah terima bersikap tidak jujur, sehingga memungkinkan terjadinya perselisihan.⁴⁷

Tujuan yang ingin dicapai dalam bermuamal dalam islam ialah keterbukaan (transparansi) serta laporan keuangan yang disusun haruslah benar dan telah sesuai dengan syariat islam. Dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah terdapat beberapa prinsip akuntansi syariah diantaranya:

- 1) Prinsip pertanggung jawaban.

Prinsip pertanggung jawaban merupakan konsep yang tidak asing di kalangan masyarakat muslim. Pertanggung jawaban sering dikaitkan dengan

⁴⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir: Aqidah, Syariah, Manhaj*, jilid 2, (Depok, Gema Insani, 2021), h.32-46

konsep amanah. Bentuk pertanggung jawaban dalam akuntansi yaitu berupa bentuk laporan akuntansi.

2) Prinsip keadilan.

Dalam akuntansi prinsip keadilan diartikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan dicatat dengan benar. Hal ini berkaitan dengan praktik moral yang berupa kejujuran. Sebab kejujuran bersifat fundamental serta berpijak pada nilai etika, syariah dan moral.

3) Prinsip Kebenaran.

Prinsip kebenaran ini sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dengan keadilan. Sebagai contoh dalam akuntansi kita senantiasa dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran dan pelaporan. Kegiatan ini bisa dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran dalam Al-Qur'an tidak diperbolehkan untuk dicampur-adukkan dengan kebathilan. Kebenaran ini bisa menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur serta melaporkan transaksi ekonomi.⁴⁸

Terdapat juga sifat atau prinsip baik dalam praktik akuntansi konvensional, diantaranya:

- 1) Kejujuran
- 2) Memiliki kepedulian terhadap status ekonomi
- 3) Sensitif terhadap nilai kerja sama
- 4) Penyebaran informasi ekonomi

Adapun persamaan kaidah akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional:

- a. Prinsip pemisahan jaminan keuangan dengan prinsip unit ekonomi

⁴⁸ Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah* Edisi 2, (Jakarta:Salemba Empat 2005), h.11-12

- b. Prinsip penahanan (hauiyah) dengan prinsip priode waktu atau tahun pembukuan keuangan
- c. Prinsip pembukuan langsung denga prinsip pencatatan bertanggal
- d. Prinsip kesaksian dalam pembukuan dengan prinsip penentuan barang
- e. Prinsip perbandingan (muqalabah) dengan prinsip perbandingan income dengan cost (biaya)
- f. Prinsip kontinuitas (istimrariah) dengan kesinambungan perusahaan
- g. Prinsip keterangan (idha) dengan penjelasan atau pemberitahuan.⁴⁹

Dilihat juga dari pola pencatatan dalam akuntansi syariah yang terdapat didalam Q.S. Al-Baqarah ayat 282 diantaranya:

- 1) Pencatatan Transaksi. Salah satu makna dari akuntansi yaitu pencatatan atau mencatat, yang dimaksudkan adalah pencatatan transaksi yang telah terjadi dan mengandung nilai ekonomi. Sedangkan didalam Al-Qur'an pencatatan yang dimasukkan ialah sebagai bukti dari transaksi, pencatatan ini dimaksudkan juga dalam menjaga kepercayaan yang kemudian akan berdampak positif terhadap interaksi bermuamalah. Hal ini sesuai dengan defenisi akuntansi yaitu penyedia informasi keuangan. Pencatatan
- 2) Identifikasi Transaksi. Yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah ketika bermuamalah hendaklah melakukan identifikasi seperti dalam halnya akuntansi yang mengidentifikasi serta menggolongkan kedalam beberapa akun seperti asset, modal, kewajiban, beban, utang, piutang atau pendapatan. Identifikasi transaksi itu sendiri dapat mempermudah dalam melakukan pencatatan laporan keuangan.

⁴⁹ Kariyoto, *Akuntansi dalam Perspektif Syariah Islam*, (Jurnal JIBEKA Vol. 7 No 2, 2013), h. 45-46.

- 3) Penulisan waktu atau Periode dalam akuntansi. Di ayat ini juga dijelaskan bahwa transaksi dalam bermuamalah haruslah jelas. Hal ini juga sesuai dengan akuntansi dimana pada laporan keuangan terdapat tanggal serta periode yang dicatat sesuai dengan transaksi.
- 4) Saksi. Dalam ayat ini diceritakan bahwa dalam bermuamalah jika ada yang berhutang maka ditulis dan disaksikan oleh 2 orang saksi. Jika dalam akuntansi saksi yang dimaksud seperti bukti transaksi dimana bukti transaksi harus valid serta jelas siapa yang melakukan transaksi, yang mengecek transaksi itu dilakukan, dan lain-lain.
- 5) Karakteristik Akuntansi. Karakteristik akuntansi dalam aturan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yaitu relevan, mudah dipahami, dan andal. Jika dibandingkan, ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap catatan transaksi dapatlah dipahami, jika tidak dapat dipahami dianjurkan menunjuk orang yang paham akan keuangan. Selain dari pada itu dalam melakukan pencatatan haruslah benar sehingga laporan keuangan yang dibuat akan mudah dipahami serta relevan.

B. Pembahasan Penelitian

1. Persepsi UMKM dalam proses penyajian laporan keuangan berbasis SAK-EMKM di Parepare

Berdasarkan dari persepsi pelaku UMKM mengenai laporan keuangan yang berbasis SAK-EMKM dilihat dari ketiga indikator yaitu pemahaman laporan keuangan, penyusunan laporan keuangan, dan kegunaan laporan keuangan bahwa beberapa dari pelaku UMKM belum memahami laporan keuangan, mengetahui laporan keuangan, dan sebagian dari pelaku UMKM yang diwawancarai menganggap bahwa laporan keuangan tidak penting untuk dilakukan.

Risal, et al mengemukakan bahwa jika suatu usaha ingin maju maka pemahaman mengenai tujuan usaha sangat dibutuhkan. Salah satunya pemahaman tentang akuntansi dan laporan keuangan. Laporan keuangan dianggap sebagai alat dalam mengetahui kondisi suatu usaha dari kinerja keuangannya. Jika pelaku usaha memiliki pemahaman yang baik mengenai akuntansi dan laporan keuangan maka pelaku usaha akan memiliki persepsi bahwa menyusun laporan keuangan itu sangat penting untuk dilakukan.⁵⁰

Ariono dan Sugiyanto mengemukakan bahwa persepsi pelaku UMKM terhadap laporan keuangan juga dipengaruhi oleh pengalaman yang dimiliki oleh pemilik usaha. Pengalaman yang dimaksudkan adalah pengalaman seberapa lama usaha telah dijalankan dengan menghendaki tersedianya informasi manajemen dan akuntansi yang diperlukan oleh suatu usaha. Jika suatu usaha yang dijalankan sudah lama dan berkembang maka kebutuhan akan informasi manajemen dan akuntansi juga akan meningkat, hal ini timbul karena timbulnya kerumitan dalam suatu usaha yang juga semakin tinggi. Persepsi pelaku usaha terhadap laporan keuangan juga timbul akibat jenjang pendidikan. Pelaku usaha yang memiliki pendidikan yang rendah akan merasa bahwa penyusunan laporan keuangan akan menyulitkan dengan kualitas penyusunan yang juga rendah, begitupun sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi pelaku usaha terhadap laporan keuangan juga dipengaruhi oleh jenjang pendidikan.⁵¹

Pemahaman pelaku usaha terhadap laporan keuangan dapat dilihat dari pengalaman yang dimiliki oleh pemilik usaha. Semakin tinggi pemahaman

⁵⁰ Risal, Febrianti, Wulandari, *Persepsi Pelaku UMKM Dalam Menyusun Laporan Keuangan*, (JAD:Jurnal Riset, 2017), h.16-27

⁵¹ Ariono, Sugiyanto, *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi atas informasi akuntansi keuangan serta keberhasilan dalam mengelola perusahaan kecil dan menengah (Studi Empiris pada UMKM Industri makanan di Wonosobo)*, (Journal of Economic, Management, Accounting and technology, 2018), h. 91-104

mengenai laporan keuangan maka akan semakin baik juga pelaku usaha dalam melakukan penyusunan laporan keuangan. Menerapkan laporan keuangan yang baik juga akan mempengaruhi kemampuan bisnis, jika pemilik usaha melakukannya.

Mereka juga berpendapat bahwa jika melakukan penyusunan laporan keuangan sangat merepotkan, menyita banyak waktu, membuat rumit pekerjaan dan menambah biaya operasional. Laporan keuangan yang dibuat oleh beberapa pelaku UMKM masih dalam bentuk sederhana, sesuai dengan kebutuhan dan pemahamannya saja seperti laporan kas masuk dan kas keluar. Beberapa dari pelaku UMKM juga mengetahui bahwa membuat laporan keuangan itu penting untuk dilakukan. Dengan adanya laporan keuangan pelaku usaha dapat mengetahui pemasukan dan pengeluaran dalam usahanya, sehingga pelaku usaha dapat mengetahui laba atau keuntungan yang diperolehnya baik sebelum pembayaran pajak dan laba setelah dikurangi dengan pajak penghasilan. Hal ini bertujuan agar pelaku usaha dapat mengetahui kinerja usahanya seperti yang disampaikan dalam wawancara. Akan tetapi proses yang pengerjaannya masih terbilang cukup jauh dari standar yang ditentukan.

Kami juga mengemukakan bahwa banyak UMKM dapat berjalan normal tanpa dukungan informasi keuangan yang memadai dan manajemen keuangan yang baik. Padahal semestinya manajemen keuangan merupakan dasar dari pengambilan keputusan untuk menentukan langkah apa yang harus dilakukan perusahaan sekarang dan ke depan.⁵² Bentuk UMKM yang dijalankan perorangan juga menjadi akibat dari minimnya kebutuhan akan penyajian laporan keuangan yang telah sesuai dengan standar akuntansi. Bentuk usaha yang dijalankan perorangan juga seringkali masih

⁵² Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 65

tidak memisahkan antara keuangan pribadi dengan keuangan kegiatan usahanya. Hal ini juga menyebabkan UMKM sulit berkembang.

Laporan keuangan bertujuan untuk penyediaan informasi mengenai posisi serta kinerja keuangan dalam suatu usaha dan akan memberikan manfaat terhadap penggunanya dalam melakukan pengambilan keputusan yang bernilai ekonomi, oleh siapapun yang tidak berada dalam posisi dapat meminta laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut. Pengguna yang dimaksudkan adalah kreditor dan investor selaku penyedia sumber daya bagi pelaku usaha. Laporan keuangan untuk memenuhi tujuannya juga menunjukkan pertanggungjawaban dalam manajemen atas sumber daya yang telah dipercayakan. Laporan keuangan saat ini juga telah menjadi salah satu syarat dalam penerbitan surat izin usaha yang diterbitkan oleh lembaga pemerintahan atau dinas terkait.

Ariono dan Sugiyanto juga mengemukakan bahwa penerapan informasi akuntansi keuangan pada UMKM sangat bermanfaat untuk mengetahui perkembangan usaha dan keuangannya. Seperti dalam hal permodalan, keuntungan maupun kerugian yang didapatkan oleh perusahaan pada suatu periode yang ditentukan. Oleh karena itu, dalam pengelolaan usaha kecil maupun menengah juga perlu membutuhkan seorang yang memiliki kemampuan dan keahlian di bidang usaha, organisasi, manajemen dan akuntansi.⁵³

Rekarti dan Doktoralina juga mengemukakan bahwa informasi akuntansi yang ada pada laporan keuangan berguna bagi perusahaan untuk mengetahui modal yang dimiliki, keadaan keuangan, untuk mengambil keputusan dalam setiap permasalahan serta dapat juga digunakan untuk menarik minat investor. Pengetahuan akuntansi

⁵³ Ariono & Sugiyanto, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Atas Informasi Akuntansi Keuangan Serta Keberhasilan dalam Mengelola Perusahaan Kecil dan Menengah (Studi Empiris Pada UMKM Industri Makanan di Wonosobo)*, Jurnal of Economic, Management, Accounting and Technology Vol 1(1), (2018), h. 91-104

yang dimiliki seorang pelaku usaha dapat dilihat melalui pengalaman dalam mengikuti pelatihan program dan seminar tentang akuntansi. Semakin tinggi tingkat pemahaman tentang akuntansi oleh pelaku usaha, maka semakin baik penyusunan informasi akuntansi pada usahanya. Selain itu apabila pelaku memiliki kemampuan akuntansi maka akan mempengaruhi dalam adaptasi bisnis dari usaha yang dijalankan.⁵⁴

UMKM yang telah mengimplementasikan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK-EMKM maka dapat dipastikan akan mempermudah dalam proses pengajuan pinjaman baik ke pihak bank atau lembaga keuangan lainnya dan juga membantu dalam ketepatan perhitungan pajak penghasilan. Untuk menciptakan UMKM sebagai pengelola keuangan yang baik, berdaya saing dan profesional maka diperlukan “keharusan” dalam menerapkan penyusunan dan pelaporan. Kebutuhan ini diantaranya dapat dilakukan dengan bentuk persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku UMKM, guna memperoleh pembiayaan maupun perizinan tertentu. Maka dari itu diperlukan adanya dukungan dan perhatian dalam bentuk pengawasan (*controlling*) dan pendampingan terhadap implementasi pencatatan akuntansi berbasis SAK EMKM pada UMKM.

Undang-undang No.20 tahun 2008 pasal 1 dan pasal 8, sebagaimana yang dimaksudkan dalam upaya meningkatkan perkembangan yang baik maka perizinan mengambil peranan yang sangat penting dalam pertumbuhan UMKM mengingat karena merupakan instrumen dalam hukum administrasi.⁵⁵ Dalam hal ini pemerintah wajib memfasilitasi serta melindungi UMKM dalam pengembangan usahanya. Perlindungan tersebut sudah dimuat dalam Peraturan Presiden No. 98 tahun 2014

⁵⁴ Rekarti & Doktoralina, *Improving Business Performance: A Proposed Model for SMEs*, *Europeans Research Studies Jurnal* Vol 20(3), (2017), h. 613-623

⁵⁵ Republik Indonesia, “Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah”, (Jakarta: 2008), h.2

tentang perizinan untuk usaha, mikro, kecil dan menengah serta terdapat juga dalam peraturan Menteri Dalam Negeri No.83 tahun 2014 tentang pedoman pemberian izin usaha mikro, kecil dan menengah. Hal ini berguna untuk meningkatkan literasi pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan.

Pelaku UMKM memerlukan dorongan dan pemahaman mengenai manfaat penyusunan laporan keuangan, misalnya dalam pencatatan transaksi. Baik bagi pelaku usaha ataupun hubungan dengan pihak lainnya, misalnya lembaga keuangan atau dalam institusi perijinan. Tahapan pertama yang harus dilakukan adalah memunculkan kesadaran pelaku UMKM dengan diadakannya pelatihan mengenai pencatatan serta penyusunan laporan keuangan. Namun, pelatihan ini akan dirasa percuma saja jika tidak ada tindak lanjut terkait dengan penerapan pencatatan laporan keuangan yang sesuai dengan standar. Maka diperlukan dukungan dan perhatian bagi pelaku UMKM sebagai wujud pengendalian sosial dalam hal ini bentuk pengawasan dan pendampingan terhadap penerapan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar. Pengawasan dan pendampingan tersebut ditujukan untuk memastikan bahwa hasil dari pelatihan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan dapat diterapkan dengan baik oleh pelaku UMKM.

Pernyataan di atas mendukung hasil penelitian oleh Risal et al., yang menyatakan bahwa upaya yang bisa dilakukan pelaku UMKM di Indonesia dalam meningkatkan pemahaman akuntansi adalah dengan cara mengikuti program pendidikan atau pelatihan akuntansi baik formal maupun non formal. Dengan begitu dapat meningkatkan kapabilitas pelaku UMKM dalam menyusun sebuah laporan keuangan usahanya.⁵⁶ Hal tersebut juga didukung hasil penelitian Kusuma dan Lutfiany yang menyatakan bahwa untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM

⁵⁶ Risal, Febrianti, Wulandari, *Persepsi Pelaku UMKM Dalam Menyusun Laporan Keuangan*, (JAD:Jurnal Riset, 2017), h.16-27

diperlukan semacam program pelatihan atau pendampingan bagi para pelaku UMKM dalam hal mengelola keuangan dengan sistem akuntansi.⁵⁷

Dukungan dari pihak kelembagaan dalam upaya menangani peningkatan kompetensi pelaku UMKM seperti berbagai kegiatan institusi pemerintah, BUMN, BUMS, serta dari aspek peraturan dan perundangan yang nantinya berfungsi sebagai alas hukum dalam kegiatan pengembangan kompetensi pelaku UMKM yang diperlukan dalam meningkatkan penerapan penyusunan laporan keuangan yang berbasis SAK-EMKM.

Persepsi pelaku UMKM akan berpengaruh terhadap penerapan SAK-EMKM. Hal ini dikarenakan setiap pelaku UMKM memiliki persepsi atau pendapat yang berbeda-beda mengenai laporan keuangan. Jika menurut pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan itu penting dilakukan dan besar manfaatnya dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Maka pelaku UMKM akan menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan SAK-EMKM, selain dari pada itu dengan adanya persepsi yang menganggap bahwa jika belajar membuat laporan keuangan yang sesuai dengan SAK-EMKM diyakini bahwa usahanya akan semakin baik dan keinginan untuk membuat usahanya semakin besar serta menarik para investor. Hal ini juga dapat merubah pola pikir pelaku UMKM yang awalnya menganggap bahwa sulit untuk melakukan penyusunan laporan keuangan menjadi mudah untuk melakukan penyusunan laporan keuangan

Sejalan dengan pendapat tersebut dapat diartikan bawah pelaku UMKM belum memahami serta mengetahui mengenai laporan keuangan berbasis SAK-EMKM. Bagi sebagian pelaku UMKM SAK-EMKM juga masih dirasa sulit untuk dilakukan bagi UMKM. SAK-EMKM merupakan Standar Akuntansi keuangan yang

⁵⁷ Kusuma & Lutfiany, Persepsi UMKM Dalam Memahami SAK-EMKM, Jurnal Akunida Vol. 4(2), No. 1, (2019), h. 23-34

diperuntukkan bagi entitas mikro, kecil dan menengah. SAK-EMKM berbeda dengan SAK-ETAP yang merupakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik yang dirasa masih menyulitkan pelaku UMKM. SAK-EMKM dibuat lebih sederhana jika dibandingkan dengan SAK-ETAP.⁵⁸

Meningkatkan pengelolah usaha yang efektif dan efisien penyusunan laporan keuangan berbasis SAK-EMKM hanya terdiri dari 3 yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan catatan atas laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan berbasis SAK-EMKM berfungsi sebagai bahan evaluasi, pengidentifikasian, serta informasi mengenai situasi keuangan usaha yang dikelola oleh pelaku UMKM. Dengan melakukan penyusunan laporan keuangan berbasis SAK-EMKM juga nantinya akan membantu mengembangkan literasi keuangan bagi pelaku UMKM serta memudahkan dalam memperoleh akses pembiayaan dalam industri perbankan. SAK-EMKM di harapkan menjadi dasar dari penyusunan dan pengembangan panduan akuntansi bagi pelaku UMKM.

2. Hambatan yang dihadapi oleh pelaku usaha UMKM dalam penyajian laporan keuangan berbasis SAK-EMKM di Parepare

Pengelolaan manajemen suatu usaha tidak akan terlepas dari permasalahan yang akan menghambat suatu tujuan dalam meningkatkan kemudahan bagi pemilik usaha. Demikian juga dengan UMKM di Kota Parepare, dalam upaya menyajikan laporan keuangan yang benar dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam SAK-EMKM. Hambatan atau kendala yang biasanya dihadapi mengenai masalah keterbatasan sumber daya manusia dan waktu dalam mengelolah sistem keuangan yang baik dan benar. Dalam penerapannya, SAK-EMKM diperuntukkan oleh pelaku

⁵⁸ Amir Hasan dan Gusnadir, *PROSPEK IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI : Entitas Mikro, Kecil Dan Menengah Berbasis Kualitas Laporan Keuangan Yang Berlaku Efektif Per 1 Januari 2018*, (Bandung: Sadaripress, 2018), h.42

UMKM yang belum mampu dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar. Dengan adanya penerapan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK-EMKM maka UMKM dalam membuat laporan keuangan akan lebih terarah.

Mengelolah usaha diperlukan pengetahuan serta pemahaman mengenai laporan keuangan. Laporan keuangan sendiri berfungsi memberikan informasi mengenai keadaan suatu usaha. Dari Hasil wawancara yang telah dilakukan bahwa hambatan yang dialami pelaku UMKM dalam melakukan penyajian laporan keuangan adalah keterbatasan pemahaman, pengetahuan mengenai penyusunan laporan keuangan.

Setiyawati dan Hermawan mengemukakan bahwa masalah yang dialami pelaku usaha dalam menyusun laporan keuangan adalah kurangnya pemahaman terhadap standar penyusunan yang berlaku serta pelaku usaha masih belum memisahkan antara aset perusahaan dan aset pribadi. Hal ini menyebabkan pelaku usaha kesulitan dalam membuat laporan keuangan.⁵⁹ Hal ini tentunya sejalan dengan pendapat responden yang menjelaskan bahwa:

“Saya belum mengetahui apa itu laporan keuangan berbasis SAK-EMKM. Mengetahui laporan keuangan sesuai akuntansi saja dirasa masih agak menyulitkan. Saya rasa kendala nya itu adalah kurang paham mengenai laporan keuangan”

Tingkat pendidikan pelaku usaha serta pemahaman akuntansi juga berpengaruh terhadap penerapan laporan sesuai dengan standar. Dewi, Yuniarta dan Wahyuni dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sosialisasi SAK-ETAP, tingkat pendidikan pemilik, dan juga persepsi pelaku UKM berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan SAK-ETAP. Namun pada tahun 2016 DSAK IAI mengeluarkan dan mengesahkan SAK baru yang dikhususkan untuk UMKM, yaitu

⁵⁹ Setiyawati, Hermawan, *Persepsi Pemilik Dan Pengetahuan Akuntansi Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Atas Penyusunan Laporan Keuangan*, (Riset Akuntansi dan keuangan Indonesia, 2018), h.161-204

SAK-EMKM.⁶⁰ Maka dari itu diperlukannya aturan dalam menerapkan standar laporan keuangan serta diperlukannya format tetap yang kemudian akan diterapkan oleh pelaku. Laporan keuangan dibuat demi kepentingan terbaik pelaku usaha yang dapat berguna untuk para pengguna informasi keuangan seperti kreditur, mitra komersial dan lembaga keuangan.

Mutiah juga mengemukakan bahwa kendala utama yang dialami pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan adalah pemahaman. Hal ini menyebabkan kurangnya pengetahuan pelaku UMKM mengenai standar laporan keuangan yang berlaku.⁶¹

Laporan keuangan sangat berguna bagi pelaku UMKM, laporan keuangan bisa digunakan sebagai pedoman dalam menentukan harga produk, menyusun dasar strategi dalam mengembangkan usahanya dan sebagai bahan dalam membuat keputusan bagi usaha dimasa depan. UMKM diharapkan mampu memiliki daya saing serta meningkatkan kualitas manajemen dan laporan keuangan dalam bekerja. Maka dalam hal ini UMKM membutuhkan pelatihan dalam penyusunan laporan keuangan.

Febrianty dan Devianto juga mengemukakan bahwa pemahaman pelaku UMKM terhadap laporan keuangan dipengaruhi oleh faktor informasi serta sosialisasi. Faktor yang paling penting dalam menjalankan suatu usaha adalah laporan keuangan.⁶² Ketika UMKM memiliki laporan keuangan akan berpengaruh kepada meluasnya akses UMKM dalam lembaga keuangan.

⁶⁰ Dewi, Yuniarta dan Wahyuni, Pengaruh Sosialisasi SAK EMKM, Tingkat Pendidikan Pemilik UMKM, (jurnal Akuntansi, 2017), h. 9-13

⁶¹ Mutiah, *Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan pada UMKM Berbasis SAK EMKM*. (International Journal of Social Science and Business vol 3(3), 2019), h.223.

⁶² Febrianty, Divianto, *Pengaruh Pemahaman Pelaku Ukm Dalam Menyusun Laporan Keuangan Terhadap Implementasi Laporan Keuangan Berdasar Sak Etap Dengan Persepsi Pelaku Ukm Sebagai Moderating Variable*, (International Journal of Social Science and Business, 1(3), 2017), h.166–176.

Beberapa UMKM sadar akan kegunaan dari laporan keuangan dapat menunjang kemajuan usahanya. Namun adanya kendala yang dialami pelaku UMKM mengenai ketidaksiapan dalam menerapkan laporan keuangan berbasis SAK-EMKM. Upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kemampuan pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan adalah memberikan pelatihan baik secara formal ataupun informal. Dinas Tenaga kerja sendiri melalui bidang UMKM sudah melakukan sosialisasi serta pembinaan mengenai penyusunan dan penyajian laporan keuangan kepada pelaku UMKM. Hal ini dilakukan secara bertahap mengingat bahwa jumlah UMKM yang terdapat di Kota Pareparea sebesar 14.415. Dengan adanya pelatihan serta sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja kepada UMKM, diharapkan mampu meningkatkan pemahaman pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan.

Ediraras mengemukakan bahwa informasi akuntansi mempunyai peranan penting untuk mencapai keberhasilan usaha, termasuk bagi usaha kecil. Informasi yang dihasilkan oleh akuntansi berguna dalam pengambilan keputusan, yaitu dalam hal : 1) dasar pertimbangan dalam pembelian bahan baku untuk produksi dan alat-alat produksi yang akan digunakan, 2) keputusan mengenai harga, 3) mengajukan permohonan pembiayaan kepada bank, 4) untuk pengembangan usaha, dan 5) penambahan dan pengembangan sumber daya manusia serta penambahan aset.⁶³

Said juga mengemukakan bahwa keterbatasan pengetahuan pembukuan atau akuntansi, rumitnya proses akuntansi, dan anggapan bahwa laporan keuangan bukanlah hal yang penting bagi UMKM.⁶⁴ Gusnadir dalam penelitiannya juga

⁶³ Ediraras, Dharma, *Akuntansi dan Kinerja UKM*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Uneversitas Gunadarma, (2010), h.152-158

⁶⁴ Amri M. Said, *Analisa Pembuktian Laporan Keuangan atas Penyajian Laporan Keuangan*, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 2008), h.89-92

mengemukakan bahwa berbagai macam keterbatasan lain dihadapi oleh UMKM mulai dari latar belakang pendidikan yang tidak mengenal tentang akuntansi atau tata buku, kurang disiplin dan rajinnya dalam pelaksanaan pembukuan akuntansi, hingga tidak adanya kecukupan dana untuk mempekerjakan akuntan atau membeli program *software* akuntansi untuk mempermudah pelaksanaan pembukuan akuntansi. Penelitian yang sama mengenai UMKM di Kota Pekanbaru menghasilkan bahwa prospek implementasi SAK ETAP di Kota Pekanbaru masih sangat rendah, hanya 13% responden yang tahu akan informasi SAK ETAP dan tidak ada satu pun responden yang mengaku paham akan isi SAK ETAP tersebut.⁶⁵

Laporan keuangan yang disusun oleh UMKM mestilah sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam hal ini SAK EMKM, sebelumnya di SAK ETAP, untuk dapat menyusun laporan keuangan yang berkualitas ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan diantaranya tingkat pendidikan, latar belakang pendidikan, ukuran usaha dan lamanya usaha juga dapat mempengaruhi laporan keuangan dari informasi akuntansi yang tercermin dalam catatan-catatan akuntansi. Banyak penelitian sudah dilakukan diantaranya meneliti tentang catatan akuntansi dan penggunaan informasi akuntansi.⁶⁶ Faktor lainnya dikemukakan oleh Grace yakni lama usaha dan pendidikan formal berpengaruh terhadap penyajian dan penggunaan informasi akuntansi.⁶⁷ Kemudian Murniati menyatakan bahwa latar belakang pendidikan nmanajer, umur

⁶⁵ Gusnardi, Jawandri Citra PS & Fenny Trisnawati, *The Influence Quality of Financial Reports for Lending and Prospects of Implementation SAK ETAP in the Small and Medium Enterprises (SMEs) in Pekanbaru City*, Pekbis Jurnal, Vol.7 No.3, (2015), h.174-184

⁶⁶ Sri Mulyani, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pada UMKM di Kabupaten Kudu*, Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis Vol. 11 No. 2 (2014), h.137-150

⁶⁷ Grace, Tianna, Solovida, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyajian dan Penggunaan Informasi Akuntansi pada Perusahaan Kecil dan Menengah di Jawa Tengah*, Tesis Magister Akuntansi UNDIP Semarang, (2003), h.118-121

perusahaan, skala usaha berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi pada UMKM.⁶⁸

Penyusunan laporan keuangan bagi UMKM atau EMKM sudah difasilitasi oleh IAI dengan menyusun standar tertentu sehingga UMKM atau EMKM lebih mudah untuk memahaminya, sehingga penyusunan laporan keuangan menjadi lebih mudah dilakukan, standar yang sudah di buat oleh IAI adalah SAK ETAP, SAK ETAP ini kemudian disempurkan sehingga lahirlah SAK EMKM. Sebelum SAK EMKM di buat, yang diberlakukan oleh IAI, yang di pedomani oleh UMKM adalah SAK ETAP yang modifikasi atau miniatur dari IFRS, tetapi sebahagian besar UMKM masih saja sulit untuk menerapkannya dalam aktivitas atau kegiatan opsional terutama dalam menyusun laporan keuangan. Hal ini disebabkan karena SAK ETAP yang diadopsi sebahagian besar dari IFRS dan terlalu luas cakupannya sehingga sulit bagi UMKM untuk mengikutinya.⁶⁹

Peraturan yang telah ditetapkan di Indonesia mewajibkan usaha kecil untuk melakukan pencatatan akuntansi yang baik yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Meskipun peraturan pencatatan akuntansi telah jelas adanya, namun pada kenyataannya masih banyak pelaku UMKM yang tidak membuat pembukuan akuntansi yang sesuai dengan standar. Untuk mengatasi masalah tersebut Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) pada tahun 2009 telah membuat Standar Akuntansi bagi Entitas Tanpa

⁶⁸ Murniati, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyiapan dan Penggunaan Informasi Akuntansi pada Pengusaha Kecil dan Menengah di Jawa Tengah*, (Tesis Universitas Diponegoro, 2002), h.123-125

⁶⁹ Amir Hasan dan Gusnadir, *PROSPEK IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI : Entitas Mikro, Kecil Dan Menengah Berbasis Kualitas Laporan Keuangan Yang Berlaku Efektif Per 1 Januari 2018*, (Bandung: Sadaripress, 2018), h.57-58

Akuntabilitas Publik, yang disebut Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).⁷⁰ SAK ETAP yang sudah ditetapkan sebagai perdoman penyusunan laporan UMKM kemudian disederhanakan sehingga lahirlah SAK EMKM yang akan mulai diberlakukan awal tahun 2018.

Sejalan dengan pentingnya laporan keuangan bagi UMKM maka sosialisasi tentang penerapan SAK EMKM pemerintah kota melalui Dinas Tenaga Kerja telah mensyaratkan UMKM agar melakukan dan melaksanakan pencatatan dan pembukuan laporan keuangan yang telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku, sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 ayat 1 pasal 29 tentang lembaga keuangan Mikro. Berdasarkan hal tersebut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dan Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) membuat serta menyusun Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK-EMKM) yang sifatnya konsisten.⁷¹ SAK-EMKM dibuat sesuai dengan standar keuangan yang telah berlaku sebelumnya. SAK-EMKM dibuat didasarkan pada keseimbangan pada prinsip akuntansi, efektivitas biaya, ukuran, kompleksitas dan kebutuhan pengguna informasi laporan keuangan serta melihat keadaan operasi bisnis dan transaksi yang berkembang.

3. Kesesuaian SAK EMKM dengan akuntansi syariah

SAK merupakan ketentuan dalam melakukan penyusunan laporan keuangan serta memberikan batasan-batasan, sehingga pencatatan laporan keuangan dapat di

⁷⁰ Rias Tuti & Patricia Febrina Dwijayanti, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi UMKM Dalam Menyusun Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP*. The 7th NCFB And Doctoral Colloquium 2014, Towards A New Indonesia Business Architecture, Sub Tema: "Business And Economic Transformation Towards AEC 2015", Fakultas Bisnis dan Pascasarjana ukwms (2015), h.58-59

⁷¹ Republik Indonesia, "Undang-Undang No.1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro", (Jakarta, 2013), h.28

catat dengan baik. SAK merupakan standar keuangan yang dibentuk dan dibuat oleh DSAK (Dewan Standar Akuntansi Keuangan). Berbeda dengan akuntansi syariah yang mengacu pada standar yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan hadist. Seperti dalam Q.S Al-Baqarah ayat 282.

Ayat tersebut menjelaskan mengenai masalah muamalah, jual-beli dan utang piutang dalam tafsiran Al-Misbah oleh Muhammad Quraish Shihab tentang ayat akuntansi dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 282 bahwa terdapat perintah untuk menuliskan kegiatan mengenai muamalah terutama dalam masalah utang-piutang ataupun kegiatan akuntansi. Hal ini dianjurkan sebagai pegangan dari dua pihak dalam melakukan transaksi, seseorang yang menuliskan mengenai transaksi (akuntan) haruslah adil, tidak boleh menganggap kecil sebuah pencatatan transaksi, semua pihak yang terlibat dalam transaksi tidak boleh saling memudharatkan.⁷²

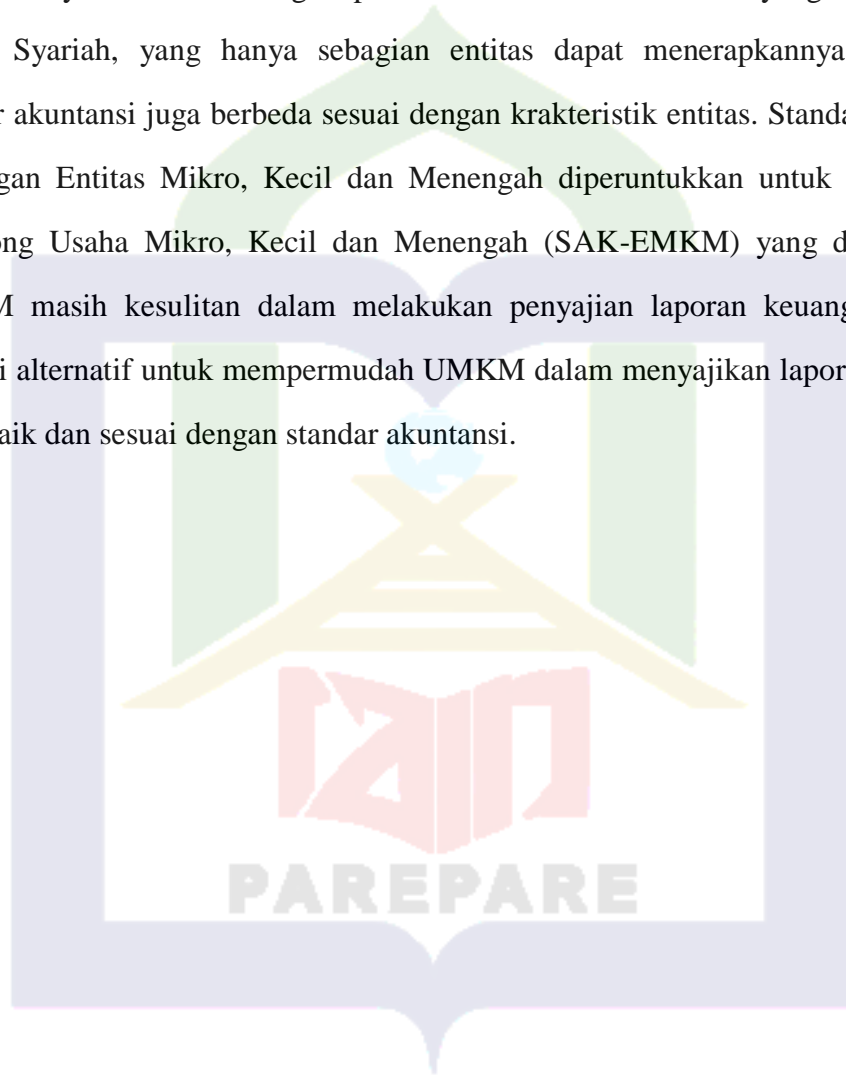
Islam telah menggaris bawahi dalam Al-Qur'an mengenai prinsip akuntansi yang harus diikuti oleh pelaku transaksi dan dalam membuat laporan keuangan, yaitu menekankan pertanggungjawaban (*Accountability*) dimana dalam pembuatan laporan keuangan harus dapat menyajikan informasi yang cukup, dapat dipercaya serta relevan.

Sejalan dengan pendapat tersebut mengenai kesesuaian SAK-EMKM dengan Akuntansi syariah dilihat konsep pencatatan akuntansi syariah seperti:

- 1) Pencatatan transaksi
- 2) Identifikasi transaksi
- 3) Penulisan waktu atau perodesasi dalam akuntansi,
- 4) Saksi
- 5) Karakteristik akuntansi.

⁷² Muhammad Quraish Sihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran, Surah Al-Fatihah dan Surah Al-Baqarah, volume 1 cetakan V, (Jakarta: Hati, 2012), h. 723

Dilihat juga dari persamaan kaidah dengan akuntansi syariah juga melihat sifat dan prinsip baik yang terkandung dalam akuntansi konvensional, hal tersebut juga telah diterapkan dalam laporan keuangan berbasis SAK-EMKM. Walaupun akuntansi syariah telah mengadopsi nilai-nilai ekonomi islam yang diatur dalam PSAK Syariah, yang hanya sebagian entitas dapat menerapkannya. Penerapan standar akuntansi juga berbeda sesuai dengan karakteristik entitas. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah diperuntukkan untuk entitas yang tergolong Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (SAK-EMKM) yang dirasa bahwa UMKM masih kesulitan dalam melakukan penyajian laporan keuangan. Hal ini sebagai alternatif untuk mempermudah UMKM dalam menyajikan laporan keuangan yang baik dan sesuai dengan standar akuntansi.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan kepada pelaku UMKM di Kota Parepare mengenai persepsi terhadap laporan keuangan berbasis SAK-EMKM maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan dari hasil wawancara terhadap 9 pelaku UMKM yang terdapat di Kota Parepare menunjukkan bahwa persepsi pelaku UMKM terhadap laporan keuangan berbasis SAK-EMKM adalah perbedaan persepsi oleh pelaku UMKM di Kota Parepare dalam penyusunan laporan keuangan berbasis SAK-EMKM, sebagian besar pelaku usaha menilai bahwa laporan keuangan sulit, rumit, menyita banyak waktu serta menambah biaya operasional jika menggunakan jasa dalam melakukan penyusunan laporan keuangan. Namun, terdapat juga beberapa pelaku usaha yang menggunakan jasa tersebut sehingga tidak menemukan masalah.
2. Berdasarkan dari hasil wawancara terhadap 9 pelaku UMKM dan Dinas Tenaga Kerja mengenai hambatan pelaku UMKM dalam melakukan penyajian laporan keuangan berbasis SAK-EMKM adalah pengetahuan dan pemahaman latar belakang akuntansi.
3. Keharusan melakukan atau membuat pencatatan atas transaksi keuangan sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Seperti yang terkandung dalam surah Al-Baqarah ayat 282 mengenai prinsip dan konsep yang dimana didalamnya juga sudah ada pada SAK-EMKM. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa SAK-EMKM sudah memiliki kesesuaian dengan pencatatan keuangan yang sudah ada didalam akuntansi syariah.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas, adapun saran yang diberikan oleh peneliti terhadap penelitian ini, antara lain:

1. Bagi pemerintah atau dinas yang terkait dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja agar sering melakukan sosialisasi dan pelatihan terkait dengan pentingnya penyusunan laporan keuangan terutama laporan keuangan berbasis SAK-EMKM kepada UMKM.
2. Bagi UMKM diharapkan agar lebih memperhatikan sistem manajemen terutama dalam hal laporan keuangan dikarenakan hal ini dapat membantu pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya. Laporan keuangan mampu memberikan informasi keuangan dalam suatu usaha.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan mampu menambah objek penelitian atau menggunakan metode yang berbeda sehingga menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Serta dalam mewawancarai pelaku UMKM menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Wawancara juga sebaiknya dilakukan pada saat jam istirahat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim Departemen Kementrian Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahanny*. Solo: Tiga Serangkai. (2014)

Buku:

Aan Komariyah, Djama'an Satori. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. (2014)

Amir Hasan, Gusnadir. *PROSPEK IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI : Entitas Mikro, Kecil Dan Menengah Berbasis Kualitas Laporan Keuangan Yang Berlaku Efektif Per 1 Januari 2018*. Bandung: Sadaripress. (2018)

Diah Nurdiwaty, Linawati. *Buku Ajar Akuntansi Syariah*. Kediri: Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri. (2020)

Hasan Ali. *Marketing*. Yogyakarta: Media Pressindo. (2009)

Hasan Amir dan Gusnadir, *PROSPEK IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI : Entitas Mikro, Kecil Dan Menengah Berbasis Kualitas Laporan Keuangan Yang Berlaku Efektif Per 1 Januari 2018*. Bandung: Sadaripress. (2018)

Jalaluddin Rakhmat. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya. (2011)

M.Umer Chapra. *Islam dan Tantangan Ekonomi*, terjemahan: Ikhwan Abidin Basri. Jakarta: Gema Insani. (2000).

Muammar Khadafi, at al. *Akuntansi Syariah: Meletakkan Nilai-Nilai Islam Dalam Ilmu Akuntansi*. Medan: Madenatera. (2016)

Muhammad. *Pengantar Akuntansi Syariah Edisi 2*. Jakarta:Salemba Empat.(2005)

Munawir. *Analisis Laporan Keuangan Edisi 4*. Yogyakarta: Liberty. (2010)

Nurhayati, wasilah. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat. (2009)

Philip Kotler. *Manajemen Pemasaran Edisi Milenium*. Jakarta: Indeks.(2002)

Riahi A., Belkaoui. *Accounting Theory*. Jakarta: Salemba Empat. (2006)

- Sri Mangesti, et al. *Akuntansi dasar sesuai dengan SAK-EMKM*. Yogyakarta: CV Budi Utama. (2020)
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. (2013)
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. (2008)
- Sulastrililis. *Manajemen Usaha Kecil Menengah.v*. Bandung: LaGood's Publishing (2016)
- Tulus Tambunan. *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesi*. Jakarta:Salemba Empat. (2002)
- Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Yogyakarta: Bintang Pustaka. (2002)
- Quraish Sihab Muhammad. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran, Surah Al-Fatihah dan Surah Al-Baqarah*, volume 1 cetakan V. Jakarta: Hati. (2012)
- Wahbah az-Zuhaili. *Tafsir al-Munir: Aqidah, Syariah, Manhaj*, Jilid 2. Depok, Gema Insani/ (2021)
- Jurnal**
- Abdul Rahman. *Analisis Terhadap Ayat Akuntansi Dalam Tafsir Al-Misbah*. Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Program Studi Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. (2016)
- Dewi, Yuniarta dan Wahyuni. *Pengaruh Sosialisasi SAK ETAP, Tingkat Pendidikan Pemilik dan Persepsi Pelaku UKM terhadap Penggunaan SAK ETAP pada UKM di Kecamatan Buleleng*. Universitas Pendidikan Ganesha: Jurnal Akuntansi Volume 7 No.1. (2017)
- Febrianty, Divianto, *Pengaruh Pemahaman Pelaku Ukm Dalam Menyusun Laporan Keuangan Terhadap Implementasi Laporan Keuangan Berdasar Sak Etap Dengan Persepsi Pelaku Ukm Sebagai Moderating Variable*, International Journal of Social Science and Business, Vol.01 No.03. (2017).

Ikatan Akuntan Indonesia. *Standar Akuntansi Keuangan (SAK)*. Jakarta: Dewan standar akuntansi keuangan Indonesia. (2007)

_____. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat. (2012)

_____. *Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Entitas Mikro, kecil dan menengah*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. (2016)

_____. *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. (2018).

Kariyoto, *Akuntansi dalam Perspektif Syariah Islam*, Jurnal JIBEKA Vol. 7 No 2, (2013)

Meidiyustiani, Rinny. *Pengaruh Pendidikan Pemilik, Pemahaman Akuntansi dan Motivasi Pemilik terhadap Penerapan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*. Universitas Budi Luhur: Jurnal Akuntansi Vol.1 No.01. (2016).

Mutiah. *Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan pada UMKM Berbasis SAK EMKM*. International Journal of Social Science and Business Vol.03 No.03. (2019).

Undang-Undang

Republik Indonesia. “Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah”. Jakarta. (2008)

Republik Indonesia. “Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan dari usaha atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu”. Jakarta. (2018)

Republik Indonesia. “Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah”. Jakarta. (2021)

Website

<http://akuntansikeuangan.com/ayat-al-quran-landasan-akuntansi-syariah/> , (diakses pada senin,07 juni 2021)

<https://news.ddtc.id/soal-laporan-keuangan-dan-kewajiban-pajak-umkm-diimbau,manfaatkan-ini-29192> (diakses pada tanggal 14 mei 2022)

laiglobal.co.id (diakses pada tanggal 14 Mei 2022)

Wawancara

Hendra, Pendamping bidang UMKM Dinas Tenaga Kerja, Wawancara penulis dilakukan di Dinas Tenaga Kerja Parepare 19 Juli 2022

Sarti, Pemilik Toko Sar, Wawancara penulis dilakukan di Toko Sar Parepare 14 Juli 2022

Lilian Ian, Pemilik Kedai SunBox, Wawancara penulis dilakukan di Kedai SunBox Parepare 14 Juli 2022

Fengky, Pemilik KMD Racing Team, Wawancara penulis dilakukan di KMD Racing Team Parepare 15 Juli 2022

Muhamad Nur Eksan, Pemilik US. Putra Jaya, Wawancara penulis dilakukan di Bengkel Motor Parepare 15 Juli 2022

Nurmi, Pemilik Toko Hj.Nurmi Collection, Wawancara penulis dilakukan Toko Hj.Nurmi Collection, Parepare 15 Juli 2022

Ria, Pemilik Laundry Gold, Wawancara penulis dilakukan di Laundry Gold Parepare 16 Juli 2022

Jaya, Pemilik Barber Madura, Wawancara penulis dilakukan di Barber Madura Parepare 16 Juli 2022

Ahmad Hoesen, Pemilik Warung Makan Pariaman laweh, Wawancara penulis dilakukan di Warung Makan Pariaman Parepare 16 Juli 2022

Wati, Pemilik Toko Cemilan Sultan, Wawancara penulis dilakukan di Toko Cemilan Sultan Parepare 16 Juli 2022

LAMPIRAN



LAMPIRAN 1

SURAT KETERANGAN





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.2649/In.39.8/PP.00.9/11/2020 26 November 2020
Lampiran : -
Perihal : **Penetapan Pembimbing Skripsi**

Yth: **1. Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.** (Pembimbing Utama)
2. Dr. Damirah, S.E., M.M. (Pembimbing Pendamping)

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Berdasarkan hasil sidang judul Mahasiswa (i) :

Nama : Sulvi Shafira Amalia
NIM. : 17.2800.048
Prodi. : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Tanggal **7 Oktober 2020** telah menempuh sidang dan dinyatakan telah diterima dengan judul:

Analisis Akuntansi Syariah tentang Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM
(Studi pada UMKM Kota Parepare)

dan telah disetujui oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka kami menetapkan Bapak/Ibu sebagai **Pembimbing Skripsi** Mahasiswa (i) dimaksud.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Dekan,

Muhammad Kamal Zubair

Tembusan:
1. Ketua LPM IAIN Parepare
2. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.2556/In.39.8/PP.00.9/07/2023
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : SULVI SHAFIRA AMALIA
Tempat/ Tgl. Lahir : PAREPARE, 20 FEBRUARI 1999
NIM : 17.2800.048
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/AKUNTANSI LEMBAGA
KEUANGAN SYARIAH
Semester : X (SEPULUH)
Alamat : JL. LAGALIGO, KELURAHAN LAPADDE, KECAMATAN
UJUNG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

PERSEPSI PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) TERHADAP LAPORAN KEUANGAN BERBASIS SAK-EMKM DI PAREPARE (ANALISIS AKUNTANSI SYARIAH)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juli sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

04 Juli 2022

Dekan,



Muhammad Hafid Muhammad



SRN IP0000479

**PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmtsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 480/IP/DPM-PTSP/7/2022

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 45 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

M E N G I Z I N K A N

KEPADA

NAMA : **SULVI SHAFIRA AMALIA**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

Jurusan : **AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH**

ALAMAT : **JL. LAGALIGO PAREPARE**

UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **PERSEPSI PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) TERHADAP LAPORAN KEUANGAN BERBASIS SAK-EMKM DI PAREPARE (ANALISIS AKUNTANSI SYARIAH)**

LOKASI PENELITIAN : **1. DINAS TENAGA KERJA KOTA PAREPARE
2. KECAMATAN SE KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **08 Juli 2022 s.d 08 Agustus 2022**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **11 Juli 2022**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM

Pangkat : **Pembina (IV/a)**

NIP : **19741013 200604 2 019**

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMTSP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai
Sertifikasi
Elektronik





PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS TENAGA KERJA

Jln.Jenderal Sudirman No.61 Telp. (0421) 21559/23046 Fax. (0421) 23517
Email : disnakerpareparekota@gmail.com

P A R E P A R E 9 1 1 2 2

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800 / 391 / Disnaker

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BASUKI BUSRAH, SE., M. Si
NIP : 19750206 200312 1 002
Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare
Unit Kerja : Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare

Menerangkan bahwa :

Nama : SULVI SHAFIRA AMALIA
NIM : 17.2800.048
Program Studi : AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Universitas/Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE

Yang tersebut namanya diatas benar telah melakukan penelitian/wawancara dengan judul penelitian "PERSEPSI PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) TERHADAP LAPORAN KEUANGAN BERBASIS SAK-EMKM DI PAREPARE (ANALISIS AKUNTANSI SYARIAH)" yang dilaksanakan mulai tanggal 08 Juli 2022 s.d 08 Agustus 2022 pada Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 01 Agustus 2022



KEPALA DINAS,

DINAS
TENAGA KERJA

BASUKI BUSRAH, SE., M. Si

Perbbina Tk. I, IV/b
NIP. 19750206 200312 1 002



LAMPIRAN 2
PEDOMAN WAWANCARA



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jln.AmalBakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box909 Parepare 91100,website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : SULVI SHAFIRA AMALIA
NIM : 17.2800.048
FAKULTAS/PRODI : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM PRODI
AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN
SYARIAH
JUDUL : PERSEPSI PELAKU USAHA MIKRO KECIL
DAN MENENGAH (UMKM) TERHADAP
LAPORAN KEUANGAN BERBASIS SAK-
EMKM DI PAREPARE (ANALISIS
AKUNTANSI SYARIAH)
PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara untuk UMKM

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai laporan keuangan yang sesuai akuntansi?
2. Bagaimana pendapat bapak/ibu, apakah pelaku UMKM perlu memahami dan melakukan penyusunan laporan keuangan berbasis SAK-EMKM?
3. Apakah bapak/ibu membuat pencatatan laporan keuangan yang sesuai SAK-EMKM

4. SAK-EMKM akan memudahkan pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan?
5. Apakah dalam meningkatkan usaha yang efektif dan efisien, SAK-EMKM sederhana untuk digunakan oleh pelaku UMKM?
6. Apakah ada hambatan bagi pelaku UMKM dalam melakukan penyajian laporan keuangan berbasis SAK-EMKM?

Wawancara untuk Dinas Tenaga Kerja

1. Apakah UMKM yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja perlu melakukan penyajian laporan keuangan?
2. Apakah laporan keuangan memudahkan pelaku UMKM?
3. Kendala atau Hambatan apa saja yang biasanya dihadapi UMKM dalam melakukan penyajian laporan Keuangan?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 06 Juni 2022

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping




Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag

Dr. Damirah, S.E., M.M

NIP.19730129 200501 1 004

NIP.19760604 200604 2 001



LAMPIRAN 3
LEMBAR WAWANCARA

Wawancara

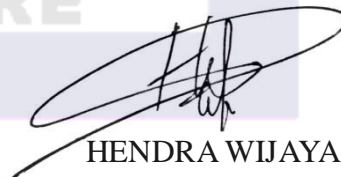
Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Terhadap Laporan Keuangan Berbasis SAK-EMKM Di Parepare (Analisis Akuntansi Syariah)

Identitas Responden

Nama : Hendra Wijaya
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat : Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare
Alamat : Jl. Jendral Sudirman

1. Apakah UMKM yang terdaftar di Dinas Ketenagakerjaan perlu melakukan penyajian laporan keuangan?
2. Apakah laporan keuangan memudahkan pelaku UMKM?
3. Kendala atau Hambatan apa saja yang biasanya dihadapi UMKM dalam melakukan penyajian laporan Keuangan?

Parepare, 19 Juli 2022



HENDRA WIJAYA

Wawancara

Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Terhadap Laporan Keuangan Berbasis SAK-EMKM Di Parepare (Analisis Akuntansi Syariah)

Identitas Responden

Nama : Sarti
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat : Toko Sarti
Alamat : Jl. Jendral Ahmad Yani

Pertanyaan :

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai laporan keuangan yang sesuai akuntansi?
2. Bagaimana pendapat bapak/ibu, apakah pelaku UMKM perlu memahami dan melakukan penyusunan laporan keuangan berbasis SAK-EMKM?
3. Apakah bapak/ibu membuat pencatatan laporan keuangan yang sesuai SAK-EMKM?
4. SAK-EMKM akan memudahkan pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan?
5. Apakah dalam meningkatkan usaha yang efektif dan efisien, SAK-EMKM sederhana untuk digunakan oleh pelaku UMKM?
6. Apakah ada hambatan bagi pelaku UMKM dalam melakukan penyajian laporan keuangan berbasis SAK-EMKM?

Parepare, 14 Juli 2022



SARTI

Wawancara

Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Terhadap Laporan Keuangan Berbasis SAK-EMKM Di Parepare (Analisis Akuntansi Syariah)

Identitas Responden

Nama : Lilian Ardirahayu
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat : Kedai Sunbox
Alamat : Tanggul, Cempae

Pertanyaan :

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai laporan keuangan yang sesuai akuntansi?
2. Bagaimana pendapat bapak/ibu, apakah pelaku UMKM perlu memahami dan melakukan penyusunan laporan keuangan berbasis SAK-EMKM?
3. Apakah bapak/ibu membuat pencatatan laporan keuangan yang sesuai SAK-EMKM?
4. SAK-EMKM akan memudahkan pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan?
5. Apakah dalam meningkatkan usaha yang efektif dan efisien, SAK-EMKM sederhana untuk digunakan oleh pelaku UMKM?
6. Apakah ada hambatan bagi pelaku UMKM dalam melakukan penyajian laporan keuangan berbasis SAK-EMKM?

Parepare, 14 Juli 2022



Wawancara

Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Terhadap Laporan Keuangan Berbasis SAK-EMKM Di Parepare (Analisis Akuntansi Syariah)

Identitas Responden

Nama : Fengky
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat : KMD Racing Motor
Alamat : Jl. Jendral Ahmad Yani

Pertanyaan :

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai laporan keuangan yang sesuai akuntansi?
2. Bagaimana pendapat bapak/ibu, apakah pelaku UMKM perlu memahami dan melakukan penyusunan laporan keuangan berbasis SAK-EMKM?
3. Apakah bapak/ibu membuat pencatatan laporan keuangan yang sesuai SAK-EMKM?
4. SAK-EMKM akan memudahkan pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan?
5. Apakah dalam meningkatkan usaha yang efektif dan efisien, SAK-EMKM sederhana untuk digunakan oleh pelaku UMKM?
6. Apakah ada hambatan bagi pelaku UMKM dalam melakukan penyajian laporan keuangan berbasis SAK-EMKM?

Parepare, 15 Juli 2022


FENGKY

Wawancara

Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Terhadap Laporan Keuangan Berbasis SAK-EMKM Di Parepare (Analisis Akuntansi Syariah)

Identitas Responden

Nama : Muhammad Nur Ehsan
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat : US. Putra Jaya
Alamat : Jl. Jend. M. Yusuf

Pertanyaan :

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai laporan keuangan yang sesuai akuntansi?
2. Bagaimana pendapat bapak/ibu, apakah pelaku UMKM perlu memahami dan melakukan penyusunan laporan keuangan berbasis SAK-EMKM?
3. Apakah bapak/ibu membuat pencatatan laporan keuangan yang sesuai SAK-EMKM?
4. SAK-EMKM akan memudahkan pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan?
5. Apakah dalam meningkatkan usaha yang efektif dan efisien, SAK-EMKM sederhana untuk digunakan oleh pelaku UMKM?
6. Apakah ada hambatan bagi pelaku UMKM dalam melakukan penyajian laporan keuangan berbasis SAK-EMKM?

Parepare, 15 Juli 2022

MUHAMMAD NUR EKSAN

Wawancara

Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Terhadap Laporan Keuangan Berbasis SAK-EMKM Di Parepare (Analisis Akuntansi Syariah)

Identitas Responden

Nama : Nurmi
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat : Toko pakaian Hj. Nurmi
Alamat : Jl. H.M Yoesoef Majid

Pertanyaan :

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai laporan keuangan yang sesuai akuntansi?
2. Bagaimana pendapat bapak/ibu, apakah pelaku UMKM perlu memahami dan melakukan penyusunan laporan keuangan berbasis SAK-EMKM?
3. Apakah bapak/ibu membuat pencatatan laporan keuangan yang sesuai SAK-EMKM?
4. SAK-EMKM akan memudahkan pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan?
5. Apakah dalam meningkatkan usaha yang efektif dan efisien, SAK-EMKM sederhana untuk digunakan oleh pelaku UMKM?
6. Apakah ada hambatan bagi pelaku UMKM dalam melakukan penyajian laporan keuangan berbasis SAK-EMKM?

Parepare, 15 Juli 2022



NURMI

Wawancara

Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Terhadap Laporan Keuangan Berbasis SAK-EMKM Di Parepare (Analisis Akuntansi Syariah)

Identitas Responden

Nama : Ria
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat : Glod Laundry
Alamat : Jl. Bau Massepe

Pertanyaan :

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai laporan keuangan yang sesuai akuntansi?
2. Bagaimana pendapat bapak/ibu, apakah pelaku UMKM perlu memahami dan melakukan penyusunan laporan keuangan berbasis SAK-EMKM?
3. Apakah bapak/ibu membuat pencatatan laporan keuangan yang sesuai SAK-EMKM?
4. SAK-EMKM akan memudahkan pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan?
5. Apakah dalam meningkatkan usaha yang efektif dan efisien, SAK-EMKM sederhana untuk digunakan oleh pelaku UMKM?
6. Apakah ada hambatan bagi pelaku UMKM dalam melakukan penyajian laporan keuangan berbasis SAK-EMKM?

Parepare, 16 Juli 2022



RIA

Wawancara

Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Terhadap Laporan Keuangan Berbasis SAK-EMKM Di Parepare (Analisis Akuntansi Syariah)

Identitas Responden

Nama : Jaya
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat : Barber Madura
Alamat : Jl. H.M. Yoesoef Majid

Pertanyaan :

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai laporan keuangan yang sesuai akuntansi?
2. Bagaimana pendapat bapak/ibu, apakah pelaku UMKM perlu memahami dan melakukan penyusunan laporan keuangan berbasis SAK-EMKM?
3. Apakah bapak/ibu membuat pencatatan laporan keuangan yang sesuai SAK-EMKM?
4. SAK-EMKM akan memudahkan pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan?
5. Apakah dalam meningkatkan usaha yang efektif dan efisien, SAK-EMKM sederhana untuk digunakan oleh pelaku UMKM?
6. Apakah ada hambatan bagi pelaku UMKM dalam melakukan penyajian laporan keuangan berbasis SAK-EMKM?

Parepare, 16 Juli 2022



JAYA

Wawancara

Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Terhadap Laporan Keuangan Berbasis SAK-EMKM Di Parepare (Analisis Akuntansi Syariah)

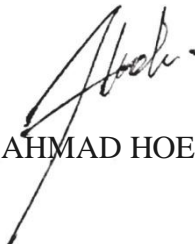
Identitas Responden

Nama : Ahmad Hoesen
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat : Warung Makan Pariaman Laweh
Alamat : Jl. Sultan Hasanuddi

Pertanyaan :

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai laporan keuangan yang sesuai akuntansi?
2. Bagaimana pendapat bapak/ibu, apakah pelaku UMKM perlu memahami dan melakukan penyusunan laporan keuangan berbasis SAK-EMKM?
3. Apakah bapak/ibu membuat pencatatan laporan keuangan yang sesuai SAK-EMKM?
4. SAK-EMKM akan memudahkan pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan?
5. Apakah dalam meningkatkan usaha yang efektif dan efisien, SAK-EMKM sederhana untuk digunakan oleh pelaku UMKM?
6. Apakah ada hambatan bagi pelaku UMKM dalam melakukan penyajian laporan keuangan berbasis SAK-EMKM?

Parepare, 16 Juli 2022


AHMAD HOESEN

Wawancara

Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Terhadap Laporan Keuangan Berbasis SAK-EMKM Di Parepare (Analisis Akuntansi Syariah)

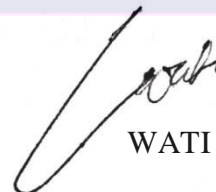
Identitas Responden

Nama : Wati
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat : Cemilan Sultan
Alamat : Jl. H.M Yoesoef Majid

Pertanyaan :

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai laporan keuangan yang sesuai akuntansi?
2. Bagaimana pendapat bapak/ibu, apakah pelaku UMKM perlu memahami dan melakukan penyusunan laporan keuangan berbasis SAK-EMKM?
3. Apakah bapak/ibu membuat pencatatan laporan keuangan yang sesuai SAK-EMKM?
4. SAK-EMKM akan memudahkan pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan?
5. Apakah dalam meningkatkan usaha yang efektif dan efisien, SAK-EMKM sederhana untuk digunakan oleh pelaku UMKM?
6. Apakah ada hambatan bagi pelaku UMKM dalam melakukan penyajian laporan keuangan berbasis SAK-EMKM?

Parepare, 16 Juli 2022



WATI



LAMPIRAN 4
DESKRIPSI LOKASI
PENELITIAN

Kota Parepare berada di kawasan selat Makassar yang menghubungkan jalur lalu lintas transportasi darat dan jalur perdagangan laut. Parepare juga merupakan kota kelahiran presiden ke-3 Republik Indonesia yaitu B.J. Habibie. Parepare terdiri dari beberapa kecamatan, yaitu Bacukiki, Bacukiki Barat, Soreang dan Ujung dengan total kelurahannya ada 22. Wilayah Parepare berbatasan langsung dengan Kabupaten Pinrang yang berada di utara, Kabupaten Sidenreng Rappang di timur, Kabupaten Barru di selatan dan Sekat Makassar di arah barat. Parepare dikenal dengan kota cinta, kota industri tanpa cerobong asap.

Kota Parepare memiliki 14.415 UMKM, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diatur dalam Undang-Undang No.20 tahun 2008 kemudian di perbarui oleh PP N0. 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah. UMKM yang ada di Kota Parepare dibawah dan ditangani oleh Dinas Tenaga Kerja. Kantor Dinas Tenaga Kerja Parepare beralamatkan di jalan Jenderal Sudirman No.61 Parepare Telp: (0421) 21559, Fax: (0421) 23517, email: disnaker@pareparekota.go.id.

Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare adalah instansi pemerintah bidang tenaga kerja pada wilayah daerah. Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare memiliki visi dan misi sebagai berikut:

- VISI** : Terwujudnya tenaga kerja, koperasi, dan usaha mikro yang mandiri, harmonis dan berkeadilan, maju dan bermartabat
- MISI** : a. Meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan meningkatkan pelayanan penempatan tenaga kerja;
- b. Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, dan

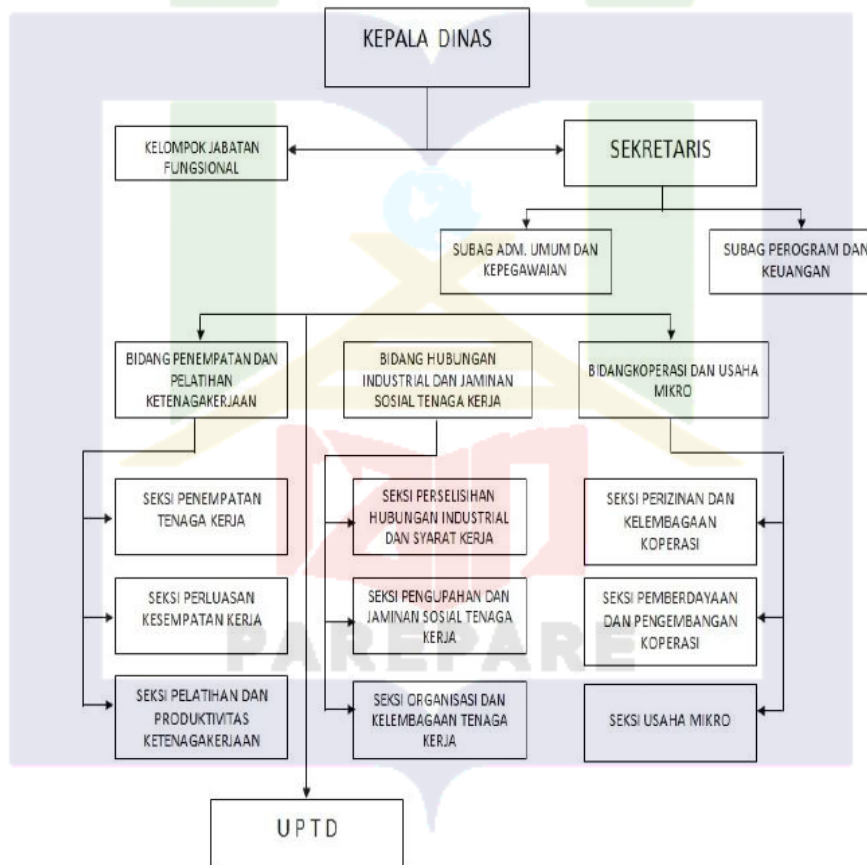
mengembangkan

pelatihan sesuai dengan standar kompetensi

c. Meningkatkan pembinaan hubungan industrial dan menciptakan ketenangan

bekerja serta ketenangan berusaha;

d. Meningkatkan keunggulan koperasi dan keunggulan kompetitif usaha mikro.



Gambar 2.2 Struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja

UMKM yang terdapat di Kota Parepare dibawah langsung oleh bidang koperasi dan usaha mikro. Aparatur Dinas Tenaga Kerja Parepare berjumlah 61 orang yang terdiri dari 59 orang PNS dan 2 aparatur tidak tetap.





LAMPIRAN 5
DOKUMENTASI



Gambar 2.3 Wawancara dengan Pendamping UMKM Dinas Tenaga Kerja



Gambar 2.4 Wawancara dengan pemilik bengkel racing



Gambar 2.5 Wawancara dengan pemilik kedai SunBox



Gambar 2.6 Wawancara dengan pemilik US. Putra Jaya

RIWAYAT HIDUP PENULIS



SULVI SHAFIRA AMALIA, lahir di Parepare pada tanggal 20 Februari 1999. Merupakan anak sulung dari 4 bersaudara, dari ayah Sultan, S.Pd dan Ibu Hakimah. Penulis memulai pendidikan di SD Negeri 3 Parepare, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Parepare hingga tahun 2014. Kemudian ditahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Parepare dan tamat pada tahun 2017. Setelah tamat dari bangku SMA, penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil jurusan Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Akhirnya penulis menyelesaikan skripsi pada tahun 2022 dengan judul skripsi: Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Laporan Keuangan Berbasis SAK-EMKM di Parepare (Analisis Akuntansi Syariah).